# RENSTRA
## RENCANA STRATEGIS
## SEKRETARIAT
## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025-2029

# GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam. Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.

7. Rencana . . .

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
10. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dasar hukum Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Setiap PD wajib menyusun Renstra PD.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

(4) Dalam rangka penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

(5) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

(6) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendekatan:
a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis;
d. atas-bawah dan bawah-atas;
e. holistik-tematik;
f. integratif; dan
g. spasial.

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra PD meliputi:
a. bab I memuat pendahuluan;
b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. bab IV memuat program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
e. bab V memuat Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

(1) Renstra PD disusun sebagai pedoman dalam:
   a. penyusunan Renja PD; dan
   b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD.

(2) Selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Renstra PD sebagai acuan bagi PD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

(3) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam (1) Renstra PD bersifat indikatif.

(4) Perubahan atas target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Renstra PD dituangkan dalam Renja PD.

Pasal 5

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.

(2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 22 SERI E

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 2025
Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Timur

Moh. Ali Kuncoro
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197708171977031002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... iii
DAFTAR GAMBAR ..... iv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4 Sistematika Penulisan ..... 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..... 7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah ..... 7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ..25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 28
2.1.5 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ..... 29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 31
2.2.2 Isu Strategis ..... 32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 35
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 ..... 35
3.2 Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .42
3.3 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ..... 43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 47
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... 47
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... 110
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... 111
BAB V PENUTUP ..... 106

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan status Kepegawaian ..... 13
Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai setiap Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ..... 13
Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan..... 14
Tabel 2.4. Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan ..... 15
Tabel 2.5 Jumlah Asset Gedung Dan Bangunan..... 16
Tabel 2.6 Jumlah Asset Peralatan Dan Mesin..... 16
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur..... 26
Tabel 2.8 Daftar Rencana Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ..... 30
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ..... 32
Tabel 2. 10 Penentuan Isu Strategis PD..... 33
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur..... 36
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur..... 40
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 ..... 45
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ..... 48
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ..... 65
Tabel 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... 110
Tabel 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... 111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ..... 12
Gambar 2.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Jawa Timur ..... 28

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berlandaskan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan

penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L, Renja Perangkat Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Timur.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Tahun 2024 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D); dan
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh Sekretariat DPRD selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan

Sekretariat DPRD serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
- 2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.1.5 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
2.2.2 Isu Strategis
**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029
3.2 Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
3.3 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
**BAB V. PENUTUP**
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab gambaran pelayanan Perangkat Daerah menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

#### 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

A. Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah:

   Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

B. Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, terdiri atas:

a. Bagian Umum, terdiri atas:
   1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan

Sedangkan uraian tugas dan fungsi Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. BAGIAN UMUM

   Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum, mempunyai fungsi:

   a. Penyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
   b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
   c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
   d. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
   e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
   f. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
   g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
   h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan
   i. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
   j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

2. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Persidangan dan Perundang mempunyai tugas menyelenggarakan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
d. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
g. Penyusun risalah rapat;
h. Pengoordinasian pembahasan Raperda;
i. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
j. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
k. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
l. Penyelenggaraan publikasi;
m. Penyelenggaraan keprotokolan; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

3. BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi::

a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
b. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
c. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
d. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
g. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
h. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
i. Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
j. Pengoordinir dan pelaksanaan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
k. Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
l. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
m. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

4. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah;
f. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;

h. Pelaksanaan fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional dan tenaga pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan tenaga pelaksana yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur**

*Sumber: Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2024*

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

**A. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai struktur organisasi terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja (PTT-PK). Adapun Sumber daya Manusia

yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebanyak 183 Orang, yang terdiri dari:

**Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan status Kepegawaian**

| Status Kepegawaian | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Pegawai Negeri Sipil | 64 | 50 | 114 |
| Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 8 | 8 | 16 |
| Pegawai Tidak Tetap | 52 | 10 | 62 |
| Total Keseluruhan | 124 | 68 | 192 |

*Sumber: Data Kepagawaian Sekretariat DPRD per tanggal 31 Agustus 2025*

Mayoritas pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah total 114 orang. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan yang paling sedikit, hanya 16 orang, dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pegawai Tidak Tetap (PTT) didominasi oleh laki-laki dengan persentase sekitar 83,9%. Secara keseluruhan, proporsi pegawai laki-laki (64,6%) lebih besar dibandingkan dengan perempuan (35,4%).

**Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai setiap Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur**

| Bagian | P3K | PNS | PTT | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sekretaris DPRD | | 1 | | 1 |
| Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | 3 | 30 | 15 | 48 |
| Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan | 8 | 32 | 9 | 49 |
| Bagian Program Dan Keuangan | 1 | 20 | 9 | 30 |
| Bagian Umum | 4 | 31 | 29 | 64 |
| Total Keseluruhan | 16 | 114 | 62 | 192 |

*Sumber: Data Kepagawaian Sekretariat DPRD per tanggal 31 Agustus 2025*

Mayoritas pegawai berada pada Bagian Umum dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu 64 orang, diikuti oleh Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dengan 49 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendominasi jumlah pegawai tetap dengan total 114 orang. Bagian yang memiliki jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) terbanyak adalah Bagian Umum dengan 29 orang. Sementara itu, Bagian

Persidangan dan Perundang-Undangan memiliki jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terbanyak, yaitu 8 orang.

**Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan**

| Golongan | P3K | PNS | PTT | Total |
|---|---|---|---|---|
| II/b | | 1 | | 1 |
| II/c | | 13 | | 13 |
| II/d | | 8 | | 8 |
| III/a | | 23 | | 23 |
| III/b | | 21 | | 21 |
| III/c | | 7 | | 7 |
| III/d | | 22 | | 22 |
| IV/a | | 16 | | 16 |
| IV/b | | 2 | | 2 |
| IV/c | | 1 | | 1 |
| IX | 13 | | | 13 |
| VII | 1 | | | 1 |
| V | 2 | | | 2 |
| Grade 3 | | | 11 | 11 |
| Grade 5 | | | 24 | 24 |
| Grade 6 | | | 24 | 24 |
| Grade 7 | | | 3 | 3 |
| Total Keseluruhan | 16 | 114 | 62 | 192 |

*Sumber: Data Kepagawaian Sekretariat DPRD per tanggal 31 Agustus 2025*

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kelompok pegawai terbesar di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 114 orang, didominasi oleh pegawai pada Golongan III sebanyak 73 orang. Selanjutnya, terdapat 16 pegawai dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang sebagian besar berada pada Golongan IX. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 62 orang, dengan distribusi terbanyak pada Grade 5 dan Grade 6, masing-masing sebanyak 24 orang.

Dengan demikian, total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berjumlah 192 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dilihat rincian pada tabel berikutnya.

**Tabel 2.4. Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan**

| Tingkat Pendidikan | P3K | PNS | PTT | Total |
|---|---|---|---|---|
| S2 | | 24 | | 24 |
| S1 | 13 | 56 | 46 | 115 |
| D-IV | | 3 | | 3 |
| D3 | 1 | 12 | | 13 |
| D1 | | | 1 | 1 |
| SMA | | 1 | 6 | 7 |
| SMK | | | 1 | 1 |
| SMU | | | 2 | 2 |
| STM | | 1 | | 1 |
| STM/SMK | | | | 0 |
| SLTA | 2 | 9 | 3 | 14 |
| SLTP | | | | 0 |
| SLTA (Paket C) | | 8 | | 8 |
| Paket B | | | 1 | 1 |
| Paket C | | | 2 | 2 |
| Total Keseluruhan | 16 | 114 | 62 | 192 |

*Sumber: Data Kepagawaian Sekretariat DPRD per tanggal 31 Agustus 2025*

Sebagian besar pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki gelar S1 (Sarjana) dengan jumlah 115 orang. Kategori ini didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 56 orang, disusul oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 46 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 13 orang. Jumlah PNS terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan S1, kemudian diikuti oleh S2 sebanyak 24 orang. Sementara itu, sebagian besar PTT juga memiliki pendidikan S1, dengan total 46 orang.

Selain itu, terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan diploma, yaitu 3 orang lulusan D-IV, 13 orang lulusan D3, dan 1 orang lulusan D1. Untuk jenjang pendidikan menengah, masih terdapat pegawai dengan latar belakang SLTA (14 orang), SLTA Paket C (8 orang), serta sebagian kecil lulusan SMA, SMK, STM, dan pendidikan non-formal setara, termasuk Paket B (1 orang) dan Paket C (2 orang).

## B. Kondisi Sarana Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Jumlah Asset Gedung Dan Bangunan**

| No | Deskripsi Barang | Luas Lantai (m2) | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedung Kantor DPRD | 15.000 | 49.704.508.124,64 | BAIK |
| 2 | Nomenklatur Kantor | 50 | 49.541.250,00 | BAIK |
| 3 | Gedung Sekretariat Dprd | 15.000 | 13.319.660.223,00 | BAIK |
| 4 | Pembuatan Pos Jaga Gedung Baru Sebelah Barat Dprd Provinsi Jawa Timur | 28 | 85.133.600,00 | BAIK |
| 5 | Media Center Dan Parkir Timur Lantai 2 Gedung DPRD Prov. Jatim | 50 | 161.993.744,00 | BAIK |
| 6 | Rehabilitasi Gedung Sekretariat Dprd | 2.316 | 9.808.778.945,00 | BAIK |
| 7 | Rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Di Surabaya | 731 | 1.700.762.650,00 | BAIK |
| 8 | Pemasangan Selasar Belakang Gedung Baru Sekretariat Dprd Prov. Jatim | 82 | 163.848.246,00 | BAIK |
| 9 | Pekerjaan Fisik Pembuatan Pintu Ruang Mesin Lift Lantai 5 Ktr Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Timur | 30 | 191.516.072,00 | BAIK |
| 10 | Fisik Pembuatan Interior 3 Ruang Kepala Bagian Kantor Sekretariat Dprd Jatim | 90 | 256.191.496,00 | BAIK |
| 11 | Pekerjaan Fisik Pembuatan Ruang Tunggu Di Lantai Ii Gedung Baru Kantor Sekretariat Dprd Provinsi Jatim | 35 | 253.053.020,00 | BAIK |
| 12 | Pengadaan Dan Pemasangan Rangka Kanopi Sekretariat Dprd Prov. Jatim | 183 | 174.368.700,00 | BAIK |
| 13 | Sky Bridge Gedung Dprd Prov Jatim | 408 | 3.610.069.480,00 | BAIK |
| | **Total** | | **79.479.425.550,64** | |

*Sumber: Data Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD, 2025*

**Tabel 2.6 Jumlah Asset Peralatan Dan Mesin**

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alat Angkutan.Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas ) | 1 | Rp3.182.302.000 | Baik |
| 2 | Alat Angkutan.Gerobak Dorong | 1 | Rp2.669.700 | Baik |
| 3 | Alat Angkutan.Gerobak Tarik | 1 | Rp9.900.000 | Baik |
| 4 | Alat Angkutan.Jeep | 2 | Rp975.500.000 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Alat Angkutan.Kendaraan Bermotor Khusus | 1 | Rp234.520.000 | Baik |
| 6 | Alat Angkutan.Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1 | Rp458.900.000 | Baik |
| 7 | Alat Angkutan.Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 1 | Rp4.488.000 | Baik |
| 8 | Alat Angkutan.Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) | 5 | Rp2.049.767.500 | Baik |
| 9 | Alat Angkutan.Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 3 | Rp3.362.451.388 | Baik |
| 10 | Alat Angkutan.Pick Up | 1 | Rp178.349.797 | Baik |
| 11 | Alat Angkutan.Sedan | 13 | Rp7.680.860.131 | Baik |
| 12 | Alat Angkutan.Sepeda | 5 | Rp199.134.000 | Baik |
| 13 | Alat Angkutan.Sepeda Motor | 35 | Rp475.477.800 | Baik |
| 14 | Alat Angkutan.Station Wagon | 21 | Rp4.602.236.699 | Baik |
| 15 | Alat Bengkel Dan Alat Ukur.Perkakas Pengangkat Bermesin | 1 | Rp900.000 | Baik |
| 16 | Alat Besar.Elevator /Lift | 1 | Rp601.788.000 | Baik |
| 17 | Alat Besar.Excavator | 1 | Rp1.445.279.000 | Baik |
| 18 | Alat Besar.Hauler | 1 | Rp8.442.500 | Baik |
| 19 | Alat Besar.Pompa | 1 | Rp98.912.000 | Baik |
| 20 | Alat Besar.Pompa Air | 1 | Rp222.068.000 | Baik |
| 21 | Alat Besar.Tractor | 1 | Rp375.595.000 | Baik |
| 22 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Ac Portable | 10 | Rp430.313.700 | Baik |
| 23 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Ac Split | 117 | Rp1.667.762.658 | Baik |
| 24 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Ac Window | 5 | Rp222.090.000 | Baik |
| 25 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Dapur | 24 | Rp261.816.562 | Baik |
| 26 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Hiasan | 7 | Rp616.925.604 | Baik |
| 27 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Kantor Lainnya | 311 | Rp5.084.649.100 | Baik |
| 28 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Pemadam Kebakaran | 2 | Rp590.147.036 | Baik |
| 29 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Pemadam/Portable | 80 | Rp208.120.000 | Baik |
| 30 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Pembersih | 47 | Rp340.356.000 | Baik |
| 31 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Pendingin | 5 | Rp2.317.501.890 | Baik |
| 32 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Penghancur Kertas | 7 | Rp478.311.500 | Baik |
| 33 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Pengukur Waktu | 1 | Rp6.498.250 | Baik |
| 34 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 11 | Rp604.659.000 | Baik |
| 35 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Perekam Suara (Voice Pen) | 1 | Rp38.850.000 | Baik |
| 36 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 165 | Rp952.819.850 | Baik |
| 37 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Bangku Panjang Kayu | 8 | Rp83.600.000 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Bracket Peralatan | 16 | Rp198.596.000 | Baik |
| 39 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Brandkas | 1 | Rp17.380.000 | Baik |
| 40 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Buffet Kayu | 1 | Rp21.560.000 | Baik |
| 41 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Cctv - Camera Control Television System | 4 | Rp406.487.550 | Baik |
| 42 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Coffee Maker | 12 | Rp31.813.100 | Baik |
| 43 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Detektor Kebakaran | 1 | Rp89.650.000 | Baik |
| 44 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Dispenser | 35 | Rp478.893.100 | Baik |
| 45 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Exhause Fan | 32 | Rp151.534.900 | Baik |
| 46 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Filing Cabinet Besi | 22 | Rp348.516.420 | Baik |
| 47 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Focusing Screen/Layar Lcd Projector | 5 | Rp35.520.000 | Baik |
| 48 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Gambar Presiden/Wakil Presiden | 44 | Rp79.310.000 | Baik |
| 49 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Handy Cam | 1 | Rp158.508.000 | Baik |
| 50 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Jam Elektronik | 11 | Rp139.150.000 | Baik |
| 51 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Jam Listrik | 1 | Rp5.799.200 | Baik |
| 52 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Jam Mekanis | 10 | Rp256.135.000 | Baik |
| 53 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kaca Hias | 1 | Rp39.468.000 | Baik |
| 54 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Karpet | 631 | Rp934.346.940 | Baik |
| 55 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kasur/Spring Bed | 2 | Rp2.497.000 | Baik |
| 56 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kipas Angin | 1 | Rp19.086.650 | Baik |
| 57 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kitchen Set | 11 | Rp124.926.450 | Baik |
| 58 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kompor Gas | 2 | Rp9.756.800 | Baik |
| 59 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kulkas/Lemari Es | 15 | Rp208.110.850 | Baik |
| 60 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Besi/Metal | 8 | Rp200.136.750 | Baik |
| 61 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Biasa | 6 | Rp144.430.000 | Baik |
| 62 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 99 | Rp141.570.000 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | 1 | Rp140.525.000 | Baik |
| 64 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Iii | 4 | Rp27.940.000 | Baik |
| 65 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kayu | 101 | Rp2.128.271.800 | Baik |
| 66 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua Dprd | 1 | Rp69.300.000 | Baik |
| 67 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 82 | Rp270.600.000 | Baik |
| 68 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 25 | Rp175.625.500 | Baik |
| 69 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pejabat | 1 | Rp131.862.500 | Baik |
| 70 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota | 1 | Rp196.625.000 | Baik |
| 71 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii | 1 | Rp3.888.500 | Baik |
| 72 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Lipat | 50 | Rp76.560.000 | Baik |
| 73 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Putar | 14 | Rp449.185.900 | Baik |
| 74 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Rapat | 45 | Rp318.817.840 | Baik |
| 75 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Tamu | 82 | Rp913.880.000 | Baik |
| 76 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Tamu Di Ruangan Ketua/Wakil Ketua Dprd | 35 | Rp186.535.500 | Baik |
| 77 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lambang Garuda Pancasila | 40 | Rp375.312.000 | Baik |
| 78 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lambang Instansi | 8 | Rp264.165.000 | Baik |
| 79 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lambang Korpri/Dharma Wanita | 7 | Rp155.388.000 | Baik |
| 80 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lcd Projector/Infocus | 1 | Rp214.674.000 | Baik |
| 81 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Besi/Metal | 24 | Rp249.095.000 | Baik |
| 82 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Buku Untuk Ketua/Wakil Ketua Dprd | 3 | Rp56.430.000 | Baik |
| 83 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon Iii | 2 | Rp7.920.000 | Baik |
| 84 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Kaca | 59 | Rp986.073.000 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Kayu | 1 | Rp19.147.500 | Baik |
| 86 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Makan | 1 | Rp10.780.000 | Baik |
| 87 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Sorok | 7 | Rp43.010.000 | Baik |
| 88 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Megaphone | 1 | Rp194.133.500 | Baik |
| 89 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Bundar | 3 | Rp40.735.000 | Baik |
| 90 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Besi/Metal | 20 | Rp35.750.000 | Baik |
| 91 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Kayu | 139 | Rp1.317.381.400 | Baik |
| 92 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua Dprd | 1 | Rp197.725.000 | Baik |
| 93 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 8 | Rp45.615.500 | Baik |
| 94 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pejabat | 31 | Rp621.673.500 | Baik |
| 95 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pejabat Eselon Ii | 1 | Rp27.060.000 | Baik |
| 96 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pejabat Eselon Iii | | Rp98.450.000 | Baik |
| 97 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Komputer | 1 | Rp24.090.000 | Baik |
| 98 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Makan Kayu | 5 | Rp29.700.000 | Baik |
| 99 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Panjang | 1 | Rp46.200.000 | Baik |
| 100 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Podium | 3 | Rp110.000.000 | Baik |
| 101 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat | 19 | Rp1.212.772.000 | Baik |
| 102 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua Dprd | 10 | Rp16.650.000 | Baik |
| 103 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 1 | Rp29.997.000 | Baik |
| 104 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Resepsionis | 1 | Rp27.610.000 | Baik |
| 105 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Tambahan | 96 | Rp337.963.750 | Baik |
| 106 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Tamu Biasa | 3 | Rp35.497.500 | Baik |
| 107 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Tamu Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 82 | Rp635.580.000 | Baik |
| 108 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Absensi | 1 | Rp60.450.500 | Baik |
| 109 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Fotocopy Folio | 1 | Rp30.250.000 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Hitung Elektronik/Calculator | 2 | Rp96.940.200 | Baik |
| 111 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Hitung Listrik | 1 | Rp16.940.000 | Baik |
| 112 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 1 | Rp111.067.000 | Baik |
| 113 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) | 2 | Rp13.392.500 | Baik |
| 114 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 2 | Rp26.120.100 | Baik |
| 115 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Kontrol Jaga | 1 | Rp30.248.350 | Baik |
| 116 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Pemotong Rumput | 1 | Rp5.500.000 | Baik |
| 117 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 10 | Rp35.285.000 | Baik |
| 118 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Penghitung Kertas/Pita Cukai | 4 | Rp230.824.000 | Baik |
| 119 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Penghitung Uang | 1 | Rp17.765.000 | Baik |
| 120 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meubelair | 1145 | Rp4.000.911.675 | Baik |
| 121 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Microphone | 1 | Rp31.641.500 | Baik |
| 122 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Palu Sidang | 1 | Rp20.988.000 | Baik |
| 123 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Panci | 1 | Rp2.331.000 | Baik |
| 124 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Papan Nama Instansi | 1 | Rp365.640.000 | Baik |
| 125 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Papan Visual/Papan Nama | 4 | Rp77.693.000 | Baik |
| 126 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Pompa Kebakaran/Portable | 12 | Rp34.050.500 | Baik |
| 127 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Rak Besi | 61 | Rp549.350.000 | Baik |
| 128 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Rak Kayu | 6 | Rp170.238.300 | Baik |
| 129 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sofa | 28 | Rp531.479.500 | Baik |
| 130 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sound System | 1 | Rp74.800.000 | Baik |
| 131 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tabung Gas | 2 | Rp1.938.400 | Baik |
| 132 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tangga Aluminium | 8 | Rp19.679.000 | Baik |
| 133 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Teko Listrik | 2 | Rp5.886.400 | Baik |
| 134 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Televisi | 129 | Rp1.733.731.700 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Thermos Air | 1 | Rp8.436.000 | Baik |
| 136 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tiang Bendera | 5 | Rp17.798.000 | Baik |
| 137 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Unit Power Supply (Ups) | 2 | Rp68.098.250 | Baik |
| 138 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Vertikal Blind | 1 | Rp70.180.000 | Baik |
| 139 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Video Cassette | 1 | Rp29.920.000 | Baik |
| 140 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Wireless | 1 | Rp15.840.000 | Baik |
| 141 | Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Alat Kedokteran Bedah | 1 | Rp9.350.000 | Baik |
| 142 | Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Alat Kedokteran Umum | 1 | Rp141.367.600 | Baik |
| 143 | Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Alat Kesehatan Olah Raga | 11 | Rp4.840.000 | Baik |
| 144 | Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Dental Chair | 1 | Rp8.635.000 | Baik |
| 145 | Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Diagnostik Set | 1 | Rp1.100.000 | Baik |
| 146 | Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 1 | Rp1.630.200 | Baik |
| 147 | Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Tensimeter | 1 | Rp130.328.000 | Baik |
| 148 | Alat Komputer.Acces Point | 1 | Rp109.668.000 | Baik |
| 149 | Alat Komputer.Cpu (Peralatan Mainframe) | 1 | Rp1.680.250 | Baik |
| 150 | Alat Komputer.Cpu (Peralatan Mini Komputer) | 1 | Rp40.645.000 | Baik |
| 151 | Alat Komputer.External | 14 | Rp37.953.400 | Baik |
| 152 | Alat Komputer.External/ Portable Hardisk | 13 | Rp44.725.500 | Baik |
| 153 | Alat Komputer.Hard Disk | 13 | Rp199.619.200 | Baik |
| 154 | Alat Komputer.Komputer Jaringan | 1 | Rp24.948.000 | Baik |
| 155 | Alat Komputer.Laptop | 40 | Rp2.095.132.730 | Baik |
| 156 | Alat Komputer.Local Area Network (Lan) | 1 | Rp283.123.500 | Baik |
| 157 | Alat Komputer.Mainframe (Komputer Jaringan) | 1 | Rp79.750.000 | Baik |
| 158 | Alat Komputer.Monitor | 27 | Rp376.376.200 | Baik |
| 159 | Alat Komputer.Note Book | 1 | Rp754.941.000 | Baik |
| 160 | Alat Komputer.Pc Unit | 25 | Rp3.182.800.950 | Baik |
| 161 | Alat Komputer.Peralatan Jaringan | 1 | Rp129.195.000 | Baik |
| 162 | Alat Komputer.Peralatan Mainframe | 1 | Rp2.385.548.000 | Baik |
| 163 | Alat Komputer.Peralatan Mini Komputer | 29 | Rp1.994.082.745 | Baik |
| 164 | Alat Komputer.Peralatan Personal Komputer | 2 | Rp224.075.500 | Baik |
| 165 | Alat Komputer.Personal Komputer | 9 | Rp460.416.000 | Baik |
| 166 | Alat Komputer.Printer | 25 | Rp1.068.840.550 | Baik |
| 167 | Alat Komputer.Scanner | 9 | Rp566.387.440 | Baik |
| 168 | Alat Komputer.Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 | Rp671.340.835 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Alat Komputer.Server | 1 | Rp1.632.331.680 | Baik |
| 170 | Alat Komputer.Switch | 1 | Rp89.399.400 | Baik |
| 171 | Alat Laboratorium.Lighting Equipment | 1 | Rp9.990.000 | Baik |
| 172 | Alat Laboratorium.Uninterupted Power Supply (Ups) | 20 | Rp33.000.000 | Baik |
| 173 | Alat Persenjataan.Digital Voice Rec S-1 330 | 1 | Rp5.720.000 | Baik |
| 174 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Alat Komunikasi Radio Ssb | 1 | Rp107.303.750 | Baik |
| 175 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Alat Komunikasi Telephone | 1 | Rp585.041.050 | Baik |
| 176 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Alat Studio Lainnya | 2 | Rp367.691.830 | Baik |
| 177 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Audio Amplifier | 1 | Rp4.180.000 | Baik |
| 178 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Audio Cassette Recorder | 5 | Rp18.727.500 | Baik |
| 179 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Audio Mixing Portable | 1 | Rp85.425.000 | Baik |
| 180 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Audio Tape Reel Recorder | 1 | Rp4.455.000 | Baik |
| 181 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio) | 1 | Rp4.290.000 | Baik |
| 182 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Betacam Recorder/Player | 1 | Rp27.280.000 | Baik |
| 183 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Camera Conference | 3 | Rp259.556.500 | Baik |
| 184 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Camera Electronic | 1 | Rp215.088.000 | Baik |
| 185 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Camera Film | 1 | Rp22.445.500 | Baik |
| 186 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Digital Audio Storage System | 1 | Rp36.850.000 | Baik |
| 187 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Digital Audio Taperecorder | 1 | Rp32.589.700 | Baik |
| 188 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Disc Record Player | 1 | Rp4.620.000 | Baik |
| 189 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Facsimile | 1 | Rp87.591.900 | Baik |
| 190 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Handy Talky (Ht) | 1 | Rp308.707.750 | Baik |
| 191 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Kamera Digital | 8 | Rp484.273.320 | Baik |
| 192 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Layar Film/Projector | 1 | Rp5.060.000 | Baik |
| 193 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Lensa Kamera | 3 | Rp748.259.000 | Baik |
| 194 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Microphone/Wireless Mic | 1 | Rp4.666.260.300 | Baik |
| 195 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Mixer Pvc | 1 | Rp25.916.000 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Monopod | 1 | Rp5.550.000 | Baik |
| 197 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Off Air Tv Monitor | 1 | Rp60.500.000 | Baik |
| 198 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Peralatan Studio Audio | 108 | Rp5.823.976.240 | Baik |
| 199 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Peralatan Studio Video Dan Film | 38 | Rp4.145.477.720 | Baik |
| 200 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Pesawat Telephone | 1 | Rp10.230.000 | Baik |
| 201 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Power Supply Microphone | 1 | Rp10.725.000 | Baik |
| 202 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Professional Sound System | 1 | Rp1.114.109.400 | Baik |
| 203 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Program Input Equipment | 5 | Rp34.870.000 | Baik |
| 204 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Slide Projector | 2 | Rp16.500.000 | Baik |
| 205 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Solar Cell | 3 | Rp597.585.000 | Baik |
| 206 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Telephone (Pabx) | 1 | Rp11.220.000 | Baik |
| 207 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Telephone Hybrid | 1 | Rp28.435.000 | Baik |
| 208 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Telex | 1 | Rp1.000.000 | Baik |
| 209 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Tripod Camera | 8 | Rp13.370.700 | Baik |
| 210 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Tvro | 5 | Rp22.275.000 | Baik |
| 211 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Uninterruptible Power Supply (Ups) | 1 | Rp106.747.590 | Baik |
| 212 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Video Conference | 1 | Rp9.826.968.000 | Baik |
| 213 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Video Cross Bar Switch | 1 | Rp68.090.000 | Baik |
| 214 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Video Monitor | 423 | Rp3.071.433.000 | Baik |
| 215 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Video Switcher | 1 | Rp9.900.000 | Baik |
| 216 | Peralatan Olah Raga.Alat Badminton | 1 | Rp25.627.250 | Baik |
| 217 | Peralatan Olah Raga.Alat Tenis Meja | 1 | Rp687.500 | Baik |
| 218 | Peralatan Olah Raga.Alat Volley | 1 | Rp23.496.000 | Baik |
| 219 | Peralatan Olah Raga.Peralatan Olah Raga Lainnya | 1 | Rp22.296.500 | Baik |
| 220 | Rambu Rambu.Rambu Bersuar | 1 | Rp17.077.000 | Baik |
| 221 | Rambu Rambu.Rambu Jalan | 1 | Rp49.720.230 | Baik |
| 222 | Rambu Rambu.Rambu Tidak Bersuar | 7 | Rp75.202.500 | Baik |
| 223 | Rambu Rambu.Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 260 | Rp519.480.000 | Baik |

| No. | JENIS BARANG | Jumlah | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 224 | Rambu Rambu.Rambu-Rambu Peringatan | 11 | Rp19.987.000 | Baik |
| **Total Keseluruhan** | | **5415** | **Rp116.011.845.850** | |

*Sumber: Data Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD, 2025*

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur selama tahun anggaran 2020 s.d. 2024. Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

| No. | Indikator | Tujuan | Sasaran | IKD | IKK LPPD | SPM | Tahun Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | √ | √ | √ | - | - | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81,05 | 82,32 | 83,91 | 84,84 | 86,13 | 100,06 % | 100,39 % | 101,10 % | 101,00 % | 101,33 % |

*Sumber: Data IKM Sekretariat DPRD, 2025*

Tabel ini merangkum capaian data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dari tahun 2020 hingga 2024. Data disajikan dalam tiga aspek utama, yaitu Target Renstra Perangkat Daerah, Realisasi Capaian, dan Rasio Capaian. Target yang ditetapkan meningkat setiap tahun, dimulai dari 81 pada tahun 2020 hingga mencapai 85 pada tahun 2024. Hasil aktual dari pelayanan menunjukkan tren peningkatan, mulai dari 81,05 pada tahun 2020 hingga 86,13 pada tahun 2024. Rasio yang mengukur realisasi terhadap target menunjukkan nilai di atas 100% untuk setiap tahun, yang berarti target tidak hanya tercapai tetapi sering kali terlampaui.

Jika dibandingkan antara persentase capaian kinerja di tahun 2022 sebesar 101.10% dari target 2022 dan tahun 2023 sebesar 101.00 % dari target 2023 maka persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 0.1%. Penurunan tersebut merupakan pembandingan tingkat prosentasi capaian kinerja dengan target kinerja di masing-masing tahun berkenaan. Namun demikian perolehan angka indeks kinerja sebesar 84.84 di tahun 2023 telah terpenuhi dengan target Renstra Perangkat Daerah dimana target akhir Renstra adalah 84. Tentunya capaian kinerja ini tidak luput dari upaya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan peningkatan kinerja secara optimal dan terus menerus.

Target Renstra menunjukkan peningkatan tahunan yang konsisten, dengan penambahan nilai 1 poin setiap tahun. Pelaksanaan layanan menunjukkan hasil nyata yang mampu dan bahkan lebih baik dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasinya sudah mencapai 81,05 (melebihi target 81), dan terus meningkat menjadi 86,13 pada tahun 2024. Pada tahun 2020, rasio capaian sebesar 100,06% yang berarti layanan sudah melampaui target. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2024, mencapai 101,33%.

Data menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD, dibuktikan dengan capaian yang tidak pernah di bawah target. Rasio pencapaian di atas 100% setiap tahun menunjukkan perangkat daerah mampu melampaui ekspektasi, mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan program. Dengan target dan realisasi yang terus meningkat, pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, tabel ini menunjukkan keberhasilan pelayanan

Sekretariat DPRD dalam memenuhi dan melampaui target, dengan tren kinerja yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Strategi yang tepat dan pelibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan ini.

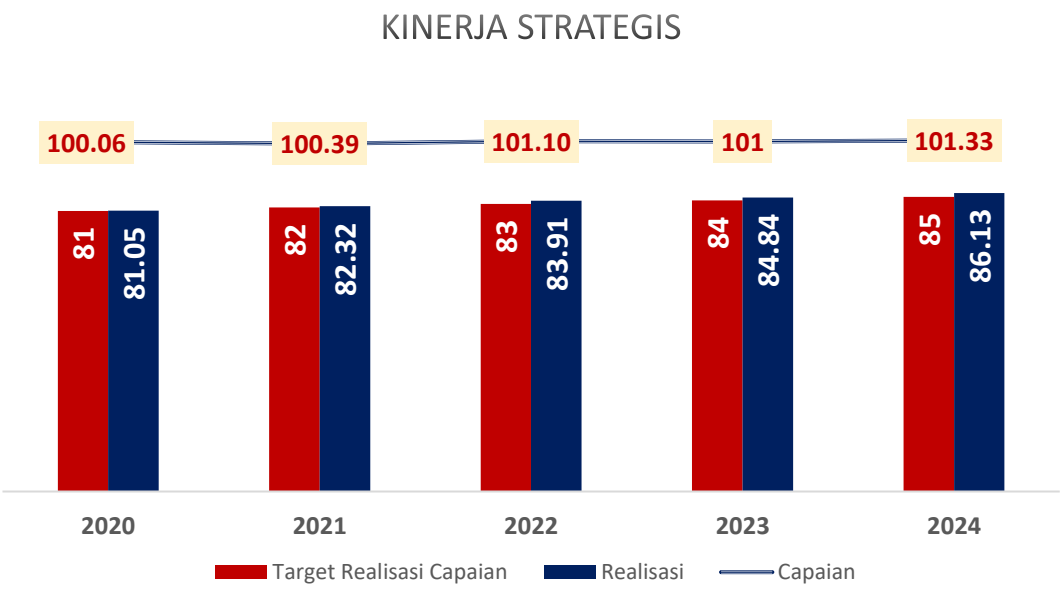


**Gambar 2.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Jawa Timur**

Data tersebut menunjukkan pencapaian positif dan konsisten. Setiap tahun realisasinya selalu mendekati atau melampaui target, menandakan kualitas strategi perencanaan yang baik dan pelaksanaan program yang efektif. Tidak ada tahun di mana capaian rasio berada di bawah 100%, menunjukkan kinerja yang konsisten. Tren kenaikan yang stabil dalam target dan realisasi mencerminkan peningkatan kapasitas institusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rasio capaian yang relatif konstan di sekitar 100% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan realistis dan dapat tercapai. Kinerja Sekretariat DPRD Jawa Timur periode 2020–2024 sangat baik, dengan realisasi capaian selalu memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. Grafik ini menunjukkan perencanaan strategi yang matang dan pelaksanaan yang konsisten. Namun, untuk kedepan, diperlukan upaya tambahan agar target yang lebih tinggi dapat tercapai dengan optimal.

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Kelompok sasaran utama layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

### 2.1.5 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merencanakan sejumlah kerja sama strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Fokus kerja sama tersebut terbagi dalam tiga bidang utama, yaitu kerja sama pendidikan, fasilitasi kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pembentukan peraturan daerah dan kerja sama luar negeri.

Pertama, dalam bidang pendidikan, Sekretariat DPRD menjalin kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beberapa universitas ternama di Jawa Timur, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kedua, dalam rangka memperkuat peran DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, Sekretariat DPRD juga melaksanakan kerja sama fasilitasi program pokok-pokok pikiran DPRD. Ketiga, pada aspek pembentukan perda dan hubungan kerja sama luar negeri, Sekretariat DPRD merencanakan kerja sama dengan Provinsi Jeollanam-Do di Korea Selatan.

Untuk mendukung seluruh program kerja sama tersebut, diperlukan dukungan berupa alokasi anggaran APBD, integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, fasilitasi kerja sama, serta dukungan teknis lainnya. Dengan adanya rencana kerja sama ini, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung tugas legislatif, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat peran DPRD sebagai representasi rakyat. Tabel daftar kerjasama daerah yang menjadi tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur disajikan pada tabel 2.8 di bawah ini.

**Tabel 2.8 Daftar Rencana Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur**

| NO. | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Urusan Pemerintahan | Program | Kegiatan | Potensi (Objek yang dikerja samakan) | Keluaran/Output | Hasil (Outcome) | Jenis Kerja Sama Daerah | Masda Pelaksanaan kerja sama (Tahun) | Rencana Mitra kerja sama | Dukungan yang diperlukan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat DPRD | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | kerja sama Tri Dharma Pendidikan | Kunjungan Parlemen, Penelitian, Parlemen Remaja, Pengabdian Masyarakat dan Bidang Lainnya | Pengembangan ilmu dan menghasilkan Peserta Didik yang berkualitas, sadar akan Lembaga Legislatif | Terwujudnya peningkatan pengembangan ilmu dan menghasilkan pengetahuan Peserta Didik yang mengetahui proses kerja legislator | KSDPK | 5 tahun | Universitas Airlangga | 1. Anggaran APBD<br>2. Integrasi dalam dokumen perencanaan<br>3. Fasilitasi kerja sama<br>4. Lain-lain | |
| 2 | Sekretariat DPRD | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | kerja sama Tri Dharma Pendidikan | Kunjungan Parlemen, Penelitian, Parlemen Remaja, Pengabdian Masyarakat dan Bidang Lainnya | Pengembangan ilmu dan menghasilkan Peserta Didik yang berkualitas, sadar akan Lembaga Legislatif | Terwujudnya peningkatan pengembangan ilmu dan menghasilkan pengetahuan Peserta Didik yang mengetahui proses kerja legislator | KSDPK | 5 tahun | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | 1. Anggaran APBD<br>2. Integrasi dalam dokumen perencanaan<br>3. Fasilitasi kerja sama<br>4. Lain-lain | |
| 3 | Sekretariat DPRD | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | kerja sama Tri Dharma Pendidikan | Kunjungan Parlemen, Penelitian, Parlemen Remaja, Pengabdian Masyarakat dan Bidang Lainnya | Pengembangan ilmu dan menghasilkan Peserta Didik yang berkualitas, sadar akan Lembaga Legislatif | Terwujudnya peningkatan pengembangan ilmu dan menghasilkan pengetahuan Peserta Didik yang mengetahui proses kerja legislator | KSDPK | 5 tahun | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) | 1. Anggaran APBD<br>2. Integrasi dalam dokumen perencanaan<br>3. Fasilitasi kerja sama<br>4. Lain-lain | |
| 4 | Sekretariat DPRD | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | kerja sama Tri Dharma Pendidikan | Kunjungan Parlemen, Penelitian, Parlemen Remaja, Pengabdian Masyarakat dan Bidang Lainnya | Pengembangan ilmu dan menghasilkan Peserta Didik yang berkualitas, sadar akan Lembaga Legislatif | Terwujudnya peningkatan pengembangan ilmu dan menghasilkan pengetahuan Peserta Didik yang mengetahui proses kerja legislator | KSDPK | 5 tahun | UIN Sunan Ampel Surabaya | 1. Anggaran APBD<br>2. Integrasi dalam dokumen perencanaan<br>3. Fasilitasi kerja sama<br>4. Lain-lain | |
| 5 | Sekretariat DPRD | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Melakukan fasilitasi kegiatan pokok-pokok pikiran | Sinergitas fasilitasi program pokok-pokok pikiran | Terciptanya sinergitas program antara DPRD dengan OPD se-Jawa Timur | Terjadinya percepatan peningkatan kualitas informasi dan data | KSDD | 5 tahun | Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur | 1. Anggaran APBD<br>2. Integrasi dalam dokumen perencanaan<br>3. Fasilitasi kerja sama<br>4. Lain-lain | |
| 6 | Sekretariat DPRD | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Melakukan fasilitasi kegiatan pokok-pokok pikiran | Sinergitas fasilitasi program pokok-pokok pikiran | Terciptanya sinergitas program antara DPRD dengan OPD se-Jawa Timur | Terjadinya percepatan peningkatan kualitas informasi dan data | KSDD | 5 tahun | Bappeda Provinsi Jawa Timur | 1. Anggaran APBD<br>2. Integrasi dalam dokumen perencanaan<br>3. Fasilitasi kerja sama<br>4. Lain-lain | |
| 7 | Sekretariat DPRD | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 1. Kerja Sama Ketenagakerjaan<br>2. Kerja Sama Teknologi Pertanian<br>3. Kesejahteraan WNI di Provinsi Jeollanam-Do (Korea Selatan) | Terlaksananya kerja sama terkait ketenagakerjaan, kerja sama teknologi, pertanian, dan terciptanya kesejahteraan WNI di Provinsi Jeollanam-Do (Korea Selatan) | Terlaksananya kerja sama terkait ketenagakerjaan, kerja sama teknologi, pertanian, dan terciptanya kesejahteraan WNI di Provinsi Jeollanam-Do (Korea Selatan) | KSDPL | 2025 | Korea Selatan | 1. Anggaran APBD<br>2. Integrasi dalam dokumen perencanaan<br>3. Fasilitasi kerja sama<br>4. Lain-lain | |

*Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/822/KPTS/013/2024 tentang Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025*

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur membantu Gubernur untuk mengemban kewenangan di bidang kesekretariatan dewan perwakilan rakyat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terdari dari Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Fasilitasi Pengangguran dan Pengawasan. Akar permasalahan masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan masih rumit.
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi otomatisasi untuk percepatan layanan.
3. Kompetensi pegawai belum optimal.
4. Distribusi pegawai tidak merata dan tidak sesuai kebutuhan unit.
5. Pengelolaan data masih manual, berdampak pada akurasi, kecepatan, dan keamanan informasi.
6. Belum ada pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi informasi.
7. Koordinasi perencanaan antar-bagian masih belum optimal.
8. Fokus evaluasi masih pada anggaran dan pelaksanaan, belum pada hasil (outcome).
9. Evaluasi internal belum dilaksanakan secara optimal.

Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Belum optimalnya sistem pelayanan publik | Pelayanan publik belum responsif | Prosedur pelayanan masih rumit. |
| | | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi otomatisasi untuk percepatan layanan. |
| Kualitas dan kapasitas SDM yang belum optimal | Kapasitas dan kualitas SDM belum optimal | Kompetensi pegawai belum optimal. |
| | | Distribusi pegawai tidak merata dan tidak sesuai kebutuhan unit. |
| | Sistem manajemen informasi belum digital | Pengelolaan data masih manual, berdampak pada akurasi, kecepatan, dan keamanan informasi. |
| | | Belum ada pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi informasi. |
| Akuntabilitas kinerja yang belum optimal | Perencanaan dan penganggaran belum terkoordinasi | Koordinasi perencanaan antar-bagian masih belum optimal. |
| | Monitoring dan evaluasi belum efektif | Fokus evaluasi masih pada anggaran dan pelaksanaan, belum pada hasil (outcome). |
| | | Evaluasi internal belum dilaksanakan secara optimal. |

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik
2. Kualitas dan kapasitas SDM yang belum optimal
3. Akuntabilitas kinerja yang belum optimal

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

**Tabel 2. 10 Penentuan Isu Strategis PD**

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| Keberagaman budaya, gotong royong, serta musyawarah mufakat | Belum optimalnya sistem pelayanan publik | Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan memperbaiki sistem perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif. | *Internet of Things* (IoT) | Transformasi tata kelola dalam menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif | Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik | Prosedur pelayanan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi otomatisasi yang lebih optimal, sehingga dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD |
| | Kualitas dan kapasitas SDM yang belum kapabel | | *Everything is a Service* (EIS)/Segala Sesuatu adalah Layanan | | | Kompetensi pegawai dapat lebih diperkuat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam pelayanan berbasis teknologi, guna mencapai hasil yang lebih maksimal |
| | Akuntabilitas kinerja yang belum optimal | | *Remote Work is Everywhere:* Tren Kerja Jarak Jauh yang Meningkat | | | Integrasi sistem pengelolaan data dapat dikelola secara digital sehingga mempermudah pelaksanaan fungsi monitoring dan pelaporan, meningkatkan efisiensi dan akurasi |
| | | | | | | Koordinasi perencanaan antar bagian dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai sinergi yang lebih baik dalam mencapai tujuan bersama |
| | | | | | | Mekanisme evaluasi kinerja internal dapat diperkuat dengan fokus pada hasil (outcome), bukan hanya pada realisasi anggaran, untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian tujuan |

Isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi otomatisasi yang lebih optimal, sehingga dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
2. Kompetensi pegawai dapat lebih diperkuat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam pelayanan berbasis teknologi, guna mencapai hasil yang lebih maksimal.
3. Integrasi sistem pengelolaan data dapat dikelola secara digital sehingga mempermudah pelaksanaan fungsi monitoring dan pelaporan, meningkatkan efisiensi dan akurasi.
4. Koordinasi perencanaan antar bagian dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai sinergi yang lebih baik dalam mencapai tujuan bersama.
5. Mekanisme evaluasi kinerja internal dapat diperkuat dengan fokus pada hasil (outcome), bukan hanya pada realisasi anggaran, untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian tujuan.

# BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Jawa Timur tahun 2025-2029 yaitu **Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045** dengan Misi yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur termasuk dalam Misi ke-7 yakni **Jatim Berkah-Amanah.** Prioritas pembangunan yang berkaitan dengan Misi Jatim Berkah-Amanah yaitu memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 adalah "**Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional dan berAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD**". Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dan berAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD".** Indikator tujuan/sasaran Sekretariat DPRD yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 dapat kita rangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur**

| No. | NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator | IKD RPJMD | IKK RPJMD | IUP | Target Capaian | | | | | | Kondisi Akhir (2029) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | Menyelenggarakan pelayanan terhadap DPRD dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Melayani dan Berintegritas. | Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional dan berAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD | Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dan berAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | v | - | - | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 88 | - |

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah " Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional dan berAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD." Tujuan ini merupakan adaptasi dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak hanya efisien dan efektif dalam melayani, tetapi juga berorientasi pada pelayanan publik serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi menetapkan sasaran strategis yaitu "Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dan berAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD." Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dukungan administratif dan fasilitasi terhadap DPRD dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima. Nilai-nilai berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) dijadikan landasan dalam membentuk budaya kerja dan perilaku organisasi yang mendukung pencapaian sasaran.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. IKM menjadi alat ukur yang mencerminkan persepsi dan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, baik dalam aspek administrasi, fasilitasi rapat, penyediaan informasi, maupun pelayanan teknis lainnya. Target capaian IKM dirancang secara bertahap dan progresif, dimulai dari nilai 86 pada tahun 2025, meningkat setiap tahun, hingga mencapai nilai 88 pada tahun 2029. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari Sekretariat DPRD untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pencapaian target tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, sekaligus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, melayani, dan berintegritas.

**Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran :**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, termasuk Sekretariat DPRD. IKM ini penting untuk mengetahui seberapa baik pelayanan yang diberikan dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini biasanya mencakup beberapa parameter pelayanan seperti: Kecepatan pelayanan, Ketepatan pelayanan, Keramahan petugas, Kualitas informasi yang diberikan, Kenyamanan fasilitas.

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis secara diskriptif kuantitatif, dengan bantuan teknik analisis Cross Tabulasi, dan secara kuantitatif dengan menggunakan formula Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan rumus sebagai berikut :

$$Nilai\ IKM\ = \frac{Total\ dari\ (Nilai\ Persepsi\ x\ Nilai\ Penimbang)}{Total\ penimbang\ dari\ seluruh\ pertanyaan\ yang\ terisi}$$

Nilai IKM yang diperoleh akan berkisar dari 1 hingga 4, dan untuk memudahkan interpretasi, maka nilai IKM tersebut di konversikan menjadi nilai mutu pelayanan dalam skala 100 dengan formula sebagai berikut:

$$Nilai\ mutu\ pelayanan\ = IKM\ Konversi$$

$$= \frac{IKM}{4}\ x\ 100$$

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 – 2,5596 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat baik |

➢ Interpretasi Nilai dan Mutu Pelayanan

Tingkat kepuasan masyarakat dan kinerja unit pelayanan dapat diinterpretasikan dengan nilai, mutu dan uraian dalam 4 kategori, sebagai berikut:

Laporan AKHIR

**a. Kepuasan Masyarakat dengan mutu D** : apabila responden menilai tingkat kinerja unit pelayanan dengan nilai persepsi 1, dengan interpretasi bahwa kinerja unit pelayanan adalah tidak baik, sehingga perlu perubahan-perubahan yang mendasar dari pelaksanaan unsur-unsur pelayanan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanannya.

**b. Kepuasan Masyarakat dengan mutu C** : apabila responden menilai tingkat kinerja unit pelayanan dengan nilai persepsi 2, dengan interpretasi bahwa kinerja unit pelayanan adalah kurang baik, dan masih banyak yang perlu dibenahi/ditingkatkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanannya.

**c. Kepuasan Masyarakat dengan mutu B** : apabila responden menilai tingkat kinerja unit pelayanan dengan nilai persepsi 3, dengan interpretasi bahwa kinerja unit pelayanan adalah baik, tetapi masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.

**d. Kepuasan Masyarakat dengan mutu A** : apabila responden menilai tingkat kinerja unit pelayanan dengan nilai persepsi 4, dengan interpretasi bahwa kinerja unit pelayanan adalah sangat baik, sehingga perlu dipertahankan.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan secara berjenjang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dapat disajikan seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur**

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Konsolidasi tata kelola layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD | Penguatan kapasitas ASN untuk mewujudkan layanan terpadu | Inovasi dan keterbukaan layanan DPRD | Digitalisasi dan integrasi data | Konsolidasi capaian dan persiapan roadmap baru |

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan administratif, keuangan, serta fasilitas teknis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik dalam hal legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Untuk memastikan layanan dukungan tersebut berjalan secara optimal, diperlukan konsolidasi tata kelola layanan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Konsolidasi tata kelola layanan ini dimaknai sebagai upaya penyatuan, penguatan, dan penataan sistem layanan di lingkungan Sekretariat DPRD agar lebih terkoordinasi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan DPRD maupun masyarakat.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penahapan penguatan kapasitas ASN yang berorientasi pada terwujudnya layanan terpadu. Penguatan kapasitas dilakukan dengan peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan integritas ASN. Peningkatan kapasitas ASN tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun layanan terpadu yang terintegrasi, efisien, transparan, dan inklusif.

Tahap ketiga menekankan pada penciptaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD. Salah satunya adalah pengembangan sistem aplikasi sebagai pusat layanan digital

yang mendukung fungsi DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Data publikasi informasi dan kanal aspirasi masyarakat diintegrasikan agar DPRD semakin terbuka dan akuntabel.

Pada tahap keempat, tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan penerapan digitalisasi dan integrasi data untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam kegiatan reses, pengawasan, dan legislasi. Seluruh layanan fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD ditargetkan telah terhubung dalam satu sistem digital terpadu sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi dan integrasi data ini juga diharapkan mampu menghadirkan basis data yang akurat, mudah diakses, serta mendukung pengambilan keputusan strategis DPRD. Selain itu, pada tahap ini dilaksanakan evaluasi untuk memastikan arah perubahan kelembagaan tetap sejalan dengan target sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tahap terakhir merupakan fase konsolidasi capaian kinerja Sekretariat DPRD. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengetahui keselarasan capaian kinerja dengan target Renstra 2025-2029 untuk mengukur tingkat keberhasilan, termasuk capaian nilai IKM DPRD. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan Roadmap Renstra Sekretariat DPRD selanjutnya. Pada akhir periode ini, diharapkan Sekretariat DPRD memiliki model pelayanan digital yang mapan, inklusif.

## 3.2 Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Strategi yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Konsolidasi Tata Kelola Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD
   - Menyusun mekanisme koordinasi antarbagian di Sekretariat DPRD melalui kegiatan penyusunan rencana aksi, penyelarasan data kepegawaian dan aset, serta monitoring evaluasi capaian kinerja dan rencana aksi.
   - Mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) layanan agar pemberian layanan dapat terstruktur dan terukur.
2. Penguatan Kapasitas ASN untuk Mewujudkan Layanan Terpadu
   - Meningkatkan penerapan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Sekretariat DPRD.
   - Meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan integritas ASN melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas berkelanjutan.
   - Membangun layanan terpadu berbasis kolaborasi antar bagian untuk mendukung fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Inovasi dan Keterbukaan Layanan DPRD
   - Mengembangkan layanan terpadu sebagai pusat layanan DPRD.
   - Mengintegrasikan kanal publikasi informasi dan aspirasi masyarakat guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas DPRD.

4. Digitalisasi dan Integrasi Data
    - Menerapkan sistem digital penuh dalam seluruh layanan fasilitasi dukungan tugas dan fungsi DPRD, termasuk reses, pengawasan, dan legislasi.
    - Menghadirkan data yang aman dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan strategis DPRD.
    - Melakukan optimalisasi layanan berbasis teknologi untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan DPRD dan masyarakat.
5. Evaluasi dan Konsolidasi Capaian Kinerja
    - Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja Renstra 2025–2029.
    - Memastikan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kinerja utama Sekretariat DPRD.
    - Menyusun Roadmap Renstra periode selanjutnya berbasis hasil evaluasi.

## 3.3 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Arah Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah perumusan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 untuk mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045” serta Misi 7 “Jatim Berkah-Amanah”. Arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029**

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Menyelenggarakan pelayanan terhadap DPRD dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. | Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. | Peningkatan kualitas fasilitasi DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses. | |
| 2 | | Peningkatan kualitas regulasi dan harmonisasi kebijakan serta pembentukan produk hukum yang berkualitas, adaptif dan taat asas. | Peningkatan dukungan teknis dan administratif bagi DPRD dalam proses legislasi. | |
| 3 | | Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. | Percepatan sistem layanan digital Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi. | |
| 4 | | Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. | Percepatan integrasi kanal informasi, pengaduan, dan aspirasi masyarakat berbasis digital. | |
| 5 | | Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berintegritas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas korupsi. | Penguatan tata kelola layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD secara transparan dan akuntabel. | |
| 6 | | Pengembangan kompetensi, penataan dan manajemen karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment.* | Peningkatan kapasitas ASN Sekretariat DPRD melalui pelatihan, pengembangan karir, dan optimalisasi penerapan budaya kerja BerAKHLAK. | |
| 7 | | Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah berdasarkan sasaran prioritas nasional dan daerah. | Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD. | |
| 8 | | Penguatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah. | Penguatan pengendalian intern Sekretariat DPRD melalui penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Optimalisasi fasilitasi kerja sama daerah dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public. | Optimalisasi fasilitasi kerja sama daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD. | |
| 10 | | Peningkatan pelayanan publik yang cepat, efektif, mudah dan transparan serta pemerataan pelayanan publik bagi kelompok rentan. | Peningkatan kualitas layanan dukungan DPRD berbasis inklusif, cepat, dan transparan. | |

Arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 telah disusun selaras dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur. Penyelarasan ini diwujudkan melalui operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, yaitu menyelenggarakan unsur pelayanan terhadap DPRD serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Setiap arah kebijakan Renstra PD dirancang untuk mendukung pencapaian arah kebijakan RPJMD, baik dalam aspek peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kualitas regulasi, percepatan digitalisasi layanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, peningkatan kapasitas ASN, maupun optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian, arah kebijakan Renstra PD merupakan rangkaian kerja yang terintegrasi dan aplikatif untuk memastikan bahwa dukungan terhadap DPRD berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Keselarasan ini sekaligus menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan Sekretariat DPRD mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD yaitu Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional dan BerAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

# BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu ditentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengampu dua program yaitu:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengampu 2 program yang terdiri dari 19 kegiatan. Kegiatan diuraikan lebih lanjut dalam beberapa sub kegiatan. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

## Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Menyelenggarakan pelayanan terhadap DPRD dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Melayani dan Berintegritas. | Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dan berAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | | |
| | | Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dan berAKHLAK dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas Fasilitasi fungsi pembentukan Perda DPRD | | Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi fungsi pembentukan Perda DPRD | **4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | **4.02.02.1.01 - Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | |
| | | | | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 4.02.02.1.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda | 4.02.02.1.01.0002 - Pembahasan Rancangan Perda | |
| | | | | Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 4.02.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4.02.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | |
| | | | | Tersusunnya Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 4.02.02.1.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | 4.02.02.1.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | | **4.02.02.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD** | |
| | | | | Terselenggaranya Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 4.02.02.1.04.0001 - Orientasi DPRD | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 4.02.02.1.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD | |
| | | | | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 4.02.02.1.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | |
| | | | | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 4.02.02.1.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | |
| | | | | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 4.02.02.1.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | |
| | | | | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 4.02.02.1.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 4.02.02.1.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD | | Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD | **4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | |
| | | | | | | **4.02.02.1.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran** | |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 4.02.02.1.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS | |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 4.02.02.1.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 4.02.02.1.02.0003 - Pembahasan APBD | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | 4.02.02.1.02.0004 - Pembahasan Perubahan APBD | |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 4.02.02.1.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester | |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 4.02.02.1.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | |
| | | | | | | **4.02.02.1.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 4.02.02.1.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 4.02.02.1.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 4.02.02.1.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 4.02.02.1.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 4.02.02.1.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 4.02.02.1.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 4.02.02.1.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran | |
| | | | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 4.02.02.1.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | |
| | | | | | | **4.02.02.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | |
| | | | | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 4.02.02.1.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah | |
| | | | | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 4.02.02.1.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 4.02.02.1.05.0003 - Pelaksanaan Reses | |
| | | | | Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | 4.02.02.1.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | **4.02.02.1.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | |
| | | | | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 4.02.02.1.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 4.02.02.1.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD | |
| | | | | | | **4.02.02.1.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah** | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 4.02.02.1.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | |
| | | | | Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | 4.02.02.1.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | |
| | | | | | | **4.02.02.1.08 - Fasilitasi Tugas DPRD** | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 4.02.02.1.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | |
| | | | | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 4.02.02.1.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 4.02.02.1.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 4.02.02.1.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 4.02.02.1.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan administrasi keuangan dalam menunjang peran DPRD sesuai dengan fungsinya | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | **4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | |
| | | | | | Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Bulanan/Tahunan | | |
| | | | | | Persentase Realisasi Anggaran | | |
| | | | | | | **4.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| | | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | | **4.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 4.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4.02.01.1.02.0003 – Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4.02.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |
| | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 4.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |
| | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | **4.02.01.1.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | |
| | | | | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 4.02.01.1.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 4.02.01.1.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan administrasi umum dalam menunjang peran DPRD sesuai dengan fungsinya | | Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah<br>Persentase Indikator Program yang tercapai<br>Indeks Profesionalitas ASN | **4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | |
| | | | | | | **4.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | |
| | | | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4.02.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 4.02.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.02.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.02.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 4.02.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | | **4.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | |
| | | | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 4.02.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | |
| | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4.02.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | |
| | | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |
| | | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 4.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | | | **4.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | |
| | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | |
| | | | | | | **4.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 4.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 4.02.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | **4.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | | | **4.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 4.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 4.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 4.02.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | | | **4.02.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan** | |
| | | | | Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan | 4.02.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan | |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program, Kegiatan, Sub-kegiatan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 4.02.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | |
| | | | | Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 4.02.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | |
| | | | | | | **4.02.01.1.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4.02.01.1.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | |
| | | | | | | **4.02.01.1.16 - Layanan Administrasi DPRD** | |
| | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 4.02.01.1.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 4.02.01.1.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 4.02.01.1.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 4.02.01.1.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | |

## Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 604,042,710,000.00 | | 600,711,166,000.00 | | 608,924,918,000.00 | | 616,588,576,000.00 | | 660,868,657,000.00 | | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 332,902,084,009.00 | | 331,902,084,009.00 | | 331,902,084,009.00 | | 331,902,084,009.00 | | 331,902,084,009.00 | | |
| Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan administrasi keuangan dalam menunjang peran DPRD sesuai dengan fungsinya | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | - | - | 83,2 | 208,821,452,562.00 | 83,4 | 208,821,452,562.00 | 83,6 | 208,821,452,562.00 | 83,8 | 208,821,452,562.00 | 84 | 208,821,452,562.00 | 83,8 | |
| | Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Bulanan/Tahunan (%) | - | - | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Persentase Realisasi Anggaran (%) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| 4.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 3,483,653,980.00 | | 3,483,653,980.00 | | 3,483,653,980.00 | | 3,483,653,980.00 | | 3,483,653,980.00 | | |
| Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | 11 | 7 | 3,483,653,980.00 | 7 | 3,483,653,980.00 | 7 | 3,483,653,980.00 | 11 | 3,483,653,980.00 | 7 | 3,483,653,980.00 | 43 | |
| | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 44 | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | |
| 4.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 2,760,219,500.00 | | 2,760,219,500.00 | | 2,760,219,500.00 | | 2,760,219,500.00 | | 2,760,219,500.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | 11 | 7 | 2,760,219,500.00 | 7 | 2,760,219,500.00 | 7 | 2,760,219,500.00 | 11 | 2,760,219,500.00 | 7 | 2,760,219,500.00 | 43 | |
| 4.02.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | 83,945,000.00 | | 83,945,000.00 | | 83,945,000.00 | | 83,945,000.00 | | 83,945,000.00 | | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 83,945,000.00 | 1 | 83,945,000.00 | 1 | 83,945,000.00 | 1 | 83,945,000.00 | 1 | 83,945,000.00 | 5 | |
| 4.02.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | 96,480,000.00 | | 96,480,000.00 | | 96,480,000.00 | | 96,480,000.00 | | 96,480,000.00 | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 96,480,000.00 | 1 | 96,480,000.00 | 1 | 96,480,000.00 | 1 | 96,480,000.00 | 1 | 96,480,000.00 | 5 | |
| 4.02.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | 78,610,000.00 | | 78,610,000.00 | | 78,610,000.00 | | 78,610,000.00 | | 78,610,000.00 | | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 78,610,000.00 | 1 | 78,610,000.00 | 1 | 78,610,000.00 | 1 | 78,610,000.00 | 1 | 78,610,000.00 | 5 | |
| 4.02.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan | | | | | 86,841,720.00 | | 86,841,720.00 | | 86,841,720.00 | | 86,841,720.00 | | 86,841,720.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 86,841,720.00 | 1 | 86,841,720.00 | 1 | 86,841,720.00 | 1 | 86,841,720.00 | 1 | 86,841,720.00 | 5 | |
| 4.02.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 194,074,760.00 | | 194,074,760.00 | | 194,074,760.00 | | 194,074,760.00 | | 194,074,760.00 | | |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 4 | 194,074,760.00 | 12 | 194,074,760.00 | 12 | 194,074,760.00 | 12 | 194,074,760.00 | 12 | 194,074,760.00 | 44 | |
| 4.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 183,483,000.00 | | 183,483,000.00 | | 183,483,000.00 | | 183,483,000.00 | | 183,483,000.00 | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 5 | 5 | 183,483,000.00 | 5 | 183,483,000.00 | 5 | 183,483,000.00 | 5 | 183,483,000.00 | 5 | 183,483,000.00 | 25 | |
| 4.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 46,223,156,882.00 | | 46,223,156,882.00 | | 46,223,156,882.00 | | 46,223,156,882.00 | | 46,223,156,882.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) | 121 | 133 | 119 | 46,223,156,882.00 | 119 | 46,223,156,882.00 | 112 | 46,223,156,882.00 | 106 | 46,223,156,882.00 | 95 | 46,223,156,882.00 | 106 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| 4.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 31,095,569,484.00 | | 31,095,569,484.00 | | 31,095,569,484.00 | | 31,095,569,484.00 | | 31,095,569,484.00 | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) | 127 | 133 | 119 | 31,095,569,484.00 | 119 | 31,095,569,484.00 | 112 | 31,095,569,484.00 | 106 | 31,095,569,484.00 | 95 | 31,095,569,484.00 | 106 | |
| 4.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | 11,579,757,240.00 | | 11,579,757,240.00 | | 11,579,757,240.00 | | 11,579,757,240.00 | | 11,579,757,240.00 | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 11,579,757,240.00 | 12 | 11,579,757,240.00 | 12 | 11,579,757,240.00 | 12 | 11,579,757,240.00 | 12 | 11,579,757,240.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 3,019,143,738.00 | | 3,019,143,738.00 | | 3,019,143,738.00 | | 3,019,143,738.00 | | 3,019,143,738.00 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 3,019,143,738.00 | 12 | 3,019,143,738.00 | 12 | 3,019,143,738.00 | 12 | 3,019,143,738.00 | 12 | 3,019,143,738.00 | 41 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.02.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | 437,388,500.00 | | 437,388,500.00 | | 437,388,500.00 | | 437,388,500.00 | | 437,388,500.00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 437,388,500.00 | 1 | 437,388,500.00 | 1 | 437,388,500.00 | 1 | 437,388,500.00 | 1 | 437,388,500.00 | 5 | |
| 4.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | 50,959,500.00 | | 50,959,500.00 | | 50,959,500.00 | | 50,959,500.00 | | 50,959,500.00 | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 1 | 50,959,500.00 | 1 | 50,959,500.00 | 1 | 50,959,500.00 | 1 | 50,959,500.00 | 1 | 50,959,500.00 | 5 | |
| 4.02.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | 12,350,000.00 | | 12,350,000.00 | | 12,350,000.00 | | 12,350,000.00 | | 12,350,000.00 | | |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 12,350,000.00 | 1 | 12,350,000.00 | 1 | 12,350,000.00 | 1 | 12,350,000.00 | 1 | 12,350,000.00 | 5 | |
| 4.02.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ | | | | | 23,793,500.00 | | 23,793,500.00 | | 23,793,500.00 | | 23,793,500.00 | | 23,793,500.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 23,793,500.00 | 4 | 23,793,500.00 | 4 | 23,793,500.00 | 4 | 23,793,500.00 | 4 | 23,793,500.00 | 17 | |
| 4.02.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | 4,194,920.00 | | 4,194,920.00 | | 4,194,920.00 | | 4,194,920.00 | | 4,194,920.00 | | |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 1 | 4,194,920.00 | 1 | 4,194,920.00 | 1 | 4,194,920.00 | 1 | 4,194,920.00 | 1 | 4,194,920.00 | 5 | |
| 4.02.01.1.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | 159,293,561,700.00 | | 159,293,561,700.00 | | 159,293,561,700.00 | | 159,293,561,700.00 | | 159,293,561,700.00 | | |
| Indeks Kepuasan Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan) | 120 | 120 | 120 | 159,114,641,700.00 | 120 | 159,114,641,700.00 | 120 | 159,114,641,700.00 | 120 | 159,114,641,700.00 | 120 | 159,114,641,700.00 | 120 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 12 | 120 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 168 | |
| 4.02.01.1.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | 158,612,558,700.00 | | 158,612,558,700.00 | | 158,612,558,700.00 | | 158,612,558,700.00 | | 158,612,558,700.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/ Bulan) | 120 | 120 | 120 | 158,612,558,700.00 | 120 | 158,612,558,700.00 | 120 | 158,612,558,700.00 | 120 | 158,612,558,700.00 | 120 | 158,612,558,700.00 | 120 | |
| 4.02.01.1.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | 502,083,000.00 | | 502,083,000.00 | | 502,083,000.00 | | 502,083,000.00 | | 502,083,000.00 | | |
| Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 12 | 120 | 12 | 502,083,000.00 | 12 | 502,083,000.00 | 12 | 502,083,000.00 | 12 | 502,083,000.00 | 12 | 502,083,000.00 | 12 | |
| Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan administrasi umum dalam menunjang peran DPRD sesuai dengan fungsinya | Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah (%) | 85,74 | 86 | 86,5 | 124,080,631,447.00 | 87 | 123,080,631,447.00 | 87,5 | 123,080,631,447.00 | 88 | 123,080,631,447.00 | 88,5 | 123,080,631,447.00 | 88 | |
| | Persentase Indikator Program yang tercapai (%) | 95 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | |
| | Indeks Profesionalitas ASN (Nilai) | 75 | 75 | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 79 | |
| 4.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 676,130,000.00 | | 676,130,000.00 | | 676,130,000.00 | | 676,130,000.00 | | 676,130,000.00 | | |
| Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 676,130,000.00 | 4 | 676,130,000.00 | 4 | 676,130,000.00 | 4 | 676,130,000.00 | 4 | 676,130,000.00 | 17 | |
| | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 14 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil | 1 | 1 | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | |
| | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | |
| | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| 4.02.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | 10,140,000.00 | | 10,140,000.00 | | 10,140,000.00 | | 10,140,000.00 | | 10,140,000.00 | | |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 10,140,000.00 | 4 | 10,140,000.00 | 4 | 10,140,000.00 | 4 | 10,140,000.00 | 4 | 10,140,000.00 | 17 | |
| 4.02.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | 631,980,000.00 | | 631,980,000.00 | | 631,980,000.00 | | 631,980,000.00 | | 631,980,000.00 | | |
| Terlaksananya Pengamanan | Jumlah Dokumen Pengamanan | 1 | 1 | 4 | 631,980,000.00 | 3 | 631,980,000.00 | 3 | 631,980,000.00 | 3 | 631,980,000.00 | 3 | 631,980,000.00 | 14 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Barang Milik Daerah SKPD | Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.1.03.00 03 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | 2,940,000.00 | | 2,940,000.00 | | 2,940,000.00 | | 2,940,000.00 | | 2,940,000.00 | | |
| Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 2,940,000.00 | 5 | 2,940,000.00 | 5 | 2,940,000.00 | 5 | 2,940,000.00 | 5 | 2,940,000.00 | 20 | |
| 4.02.01.1.03.00 04 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 13,660,000.00 | | 13,660,000.00 | | 13,660,000.00 | | 13,660,000.00 | | 13,660,000.00 | | |
| Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 13,660,000.00 | 4 | 13,660,000.00 | 4 | 13,660,000.00 | 4 | 13,660,000.00 | 4 | 13,660,000.00 | 17 | |
| 4.02.01.1.03.00 05 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 4,280,000.00 | | 4,280,000.00 | | 4,280,000.00 | | 4,280,000.00 | | 4,280,000.00 | | |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 4,280,000.00 | 4 | 4,280,000.00 | 4 | 4,280,000.00 | 4 | 4,280,000.00 | 4 | 4,280,000.00 | 17 | |
| 4.02.01.1.03.00 06 - Penatausahaan Barang Milik | | | | | 7,950,000.00 | | 7,950,000.00 | | 7,950,000.00 | | 7,950,000.00 | | 7,950,000.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 7,950,000.00 | 12 | 7,950,000.00 | 12 | 7,950,000.00 | 12 | 7,950,000.00 | 12 | 7,950,000.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | 5,180,000.00 | | 5,180,000.00 | | 5,180,000.00 | | 5,180,000.00 | | 5,180,000.00 | | |
| Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 5,180,000.00 | 1 | 5,180,000.00 | 1 | 5,180,000.00 | 1 | 5,180,000.00 | 1 | 5,180,000.00 | 8 | |
| 4.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 4,749,330,225.00 | | 4,749,330,225.00 | | 4,749,330,225.00 | | 4,749,330,225.00 | | 4,749,330,225.00 | | |
| Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 1 | 1 | 4 | 4,749,330,225.00 | 1 | 4,749,330,225.00 | 1 | 4,749,330,225.00 | 1 | 4,749,330,225.00 | 1 | 4,749,330,225.00 | 8 | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 16 | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 127 | 133 | 119 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 327 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | 90 | 119 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 7709 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | 90 | 119 | | 195 | | 195 | | 195 | | 195 | | 794 | |
| 4.02.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | 4,660,000.00 | | 4,660,000.00 | | 4,660,000.00 | | 4,660,000.00 | | 4,660,000.00 | | |
| Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 1 | 1 | 4 | 4,660,000.00 | 1 | 4,660,000.00 | 1 | 4,660,000.00 | 1 | 4,660,000.00 | 1 | 4,660,000.00 | 8 | |
| 4.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a | | | | | 808,808,190.00 | | 808,808,190.00 | | 808,808,190.00 | | 808,808,190.00 | | 808,808,190.00 | | |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 1 | 4 | 808,808,190.00 | 4 | 808,808,190.00 | 3 | 808,808,190.00 | 4 | 808,808,190.00 | 3 | 808,808,190.00 | 16 | |
| 4.02.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan | | | | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 2,000,000.00 | 12 | 2,000,000.00 | 12 | 2,000,000.00 | 12 | 2,000,000.00 | 12 | 2,000,000.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | 2,047,693,800.00 | | 2,047,693,800.00 | | 2,047,693,800.00 | | 2,047,693,800.00 | | 2,047,693,800.00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 2,047,693,800.00 | 12 | 2,047,693,800.00 | 12 | 2,047,693,800.00 | 12 | 2,047,693,800.00 | 12 | 2,047,693,800.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | 362,677,000.00 | | 362,677,000.00 | | 362,677,000.00 | | 362,677,000.00 | | 362,677,000.00 | | |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 362,677,000.00 | 12 | 362,677,000.00 | 12 | 362,677,000.00 | 12 | 362,677,000.00 | 12 | 362,677,000.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | 561,343,635.00 | | 561,343,635.00 | | 561,343,635.00 | | 561,343,635.00 | | 561,343,635.00 | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 127 | 133 | 119 | 561,343,635.00 | 25 | 561,343,635.00 | 25 | 561,343,635.00 | 25 | 561,343,635.00 | 25 | 561,343,635.00 | 327 | |
| 4.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan | | | | | 481,233,800.00 | | 481,233,800.00 | | 481,233,800.00 | | 481,233,800.00 | | 481,233,800.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | 90 | 119 | 481,233,800.00 | 2.5 | 481,233,800.00 | 2.5 | 481,233,800.00 | 2.5 | 481,233,800.00 | 2.5 | 481,233,800.00 | 7709 | |
| 4.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 480,913,800.00 | | 480,913,800.00 | | 480,913,800.00 | | 480,913,800.00 | | 480,913,800.00 | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | 90 | 119 | 480,913,800.00 | 195 | 480,913,800.00 | 195 | 480,913,800.00 | 195 | 480,913,800.00 | 195 | 480,913,800.00 | 794 | |
| 4.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 15,979,717,600.00 | | 15,979,717,600.00 | | 15,979,717,600.00 | | 15,979,717,600.00 | | 15,979,717,600.00 | | |
| Jumlah laporan penyediaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1 | 15,979,717,600.00 | 4 | 15,979,717,600.00 | 4 | 15,979,717,600.00 | 4 | 15,979,717,600.00 | 4 | 15,979,717,600.00 | 14 | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 8 | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 16 | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | 10 | 10 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 56 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 4 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 44 | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 7 | |
| 4.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 495,928,000.00 | | 495,928,000.00 | | 495,928,000.00 | | 495,928,000.00 | | 495,928,000.00 | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera | 1 | 1 | 1 | 495,928,000.00 | 4 | 495,928,000.00 | 4 | 495,928,000.00 | 4 | 495,928,000.00 | 4 | 495,928,000.00 | 14 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| gan Bangunan Kantor | ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 10,584,000.00 | | 10,584,000.00 | | 10,584,000.00 | | 10,584,000.00 | | 10,584,000.00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1 | 10,584,000.00 | 2 | 10,584,000.00 | 2 | 10,584,000.00 | 2 | 10,584,000.00 | 2 | 10,584,000.00 | 8 | |
| 4.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | 517,117,000.00 | | 517,117,000.00 | | 517,117,000.00 | | 517,117,000.00 | | 517,117,000.00 | | |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 2 | 517,117,000.00 | 4 | 517,117,000.00 | 4 | 517,117,000.00 | 4 | 517,117,000.00 | 4 | 517,117,000.00 | 16 | |
| 4.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | 4,048,272,000.00 | | 4,048,272,000.00 | | 4,048,272,000.00 | | 4,048,272,000.00 | | 4,048,272,000.00 | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | 10 | 10 | 4,048,272,000.00 | 12 | 4,048,272,000.00 | 12 | 4,048,272,000.00 | 12 | 4,048,272,000.00 | 12 | 4,048,272,000.00 | 56 | |
| 4.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | 1,940,509,600.00 | | 1,940,509,600.00 | | 1,940,509,600.00 | | 1,940,509,600.00 | | 1,940,509,600.00 | | |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 4 | 4 | 1,940,509,600.00 | 12 | 1,940,509,600.00 | 12 | 1,940,509,600.00 | 12 | 1,940,509,600.00 | 12 | 1,940,509,600.00 | 44 | |
| 4.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 754,400,000.00 | | 754,400,000.00 | | 754,400,000.00 | | 754,400,000.00 | | 754,400,000.00 | | |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | 1 | 1 | 4 | 754,400,000.00 | 4 | 754,400,000.00 | 4 | 754,400,000.00 | 4 | 754,400,000.00 | 4 | 754,400,000.00 | 17 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | 6,490,852,000.00 | | 6,490,852,000.00 | | 6,490,852,000.00 | | 6,490,852,000.00 | | 6,490,852,000.00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 6,490,852,000.00 | 12 | 6,490,852,000.00 | 12 | 6,490,852,000.00 | 12 | 6,490,852,000.00 | 12 | 6,490,852,000.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 1,261,830,000.00 | | 1,261,830,000.00 | | 1,261,830,000.00 | | 1,261,830,000.00 | | 1,261,830,000.00 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 1,261,830,000.00 | 12 | 1,261,830,000.00 | 12 | 1,261,830,000.00 | 12 | 1,261,830,000.00 | 12 | 1,261,830,000.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | 260,225,000.00 | | 260,225,000.00 | | 260,225,000.00 | | 260,225,000.00 | | 260,225,000.00 | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 260,225,000.00 | 1 | 260,225,000.00 | 1 | 260,225,000.00 | 1 | 260,225,000.00 | 1 | 260,225,000.00 | 8 | |
| 4.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 200,000,000.00 | 1 | 200,000,000.00 | 1 | 200,000,000.00 | 1 | 200,000,000.00 | 1 | 200,000,000.00 | 7 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 4.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 13,634,417,600.00 | | 12,634,417,600.00 | | 12,634,417,600.00 | | 12,634,417,600.00 | | 12,634,417,600.00 | | |
| Jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | 13,634,417,600.00 | 1 | 12,634,417,600.00 | 1 | 12,634,417,600.00 | 5 | 12,634,417,600.00 | 1 | 12,634,417,600.00 | 8 | |
| | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 19 | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 50 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 87 | |
| | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 33 | |
| | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | |
| | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | |
| 4.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 5 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 8 | |
| 4.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 4 | |
| 4.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | | 2,047,478,000.00 | | 2,047,478,000.00 | | 2,047,478,000.00 | | 2,047,478,000.00 | | 2,047,478,000.00 | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 3 | 2,047,478,000.00 | 5 | 2,047,478,000.00 | 5 | 2,047,478,000.00 | 5 | 2,047,478,000.00 | 5 | 2,047,478,000.00 | 19 | |
| 4.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 7,106,818,000.00 | | 7,106,818,000.00 | | 7,106,818,000.00 | | 7,106,818,000.00 | | 7,106,818,000.00 | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang | 1 | 1 | 50 | 7,106,818,000.00 | 12 | 7,106,818,000.00 | 12 | 7,106,818,000.00 | 12 | 7,106,818,000.00 | 12 | 7,106,818,000.00 | 87 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | 1,280,121,600.00 | | 1,280,121,600.00 | | 1,280,121,600.00 | | 1,280,121,600.00 | | 1,280,121,600.00 | | |
| Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 8 | 1,280,121,600.00 | 8 | 1,280,121,600.00 | 8 | 1,280,121,600.00 | 8 | 1,280,121,600.00 | 8 | 1,280,121,600.00 | 33 | |
| 4.02.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | 200,000,000.00 | 1 | 200,000,000.00 | 1 | 200,000,000.00 | 1 | 200,000,000.00 | 1 | 200,000,000.00 | 4 | |
| 4.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 1,000,000,000.00 | | - | | - | | - | | - | | |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 1 | 1,000,000,000.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | |
| 4.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 4 | |
| 4.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 1 | 500,000,000.00 | 4 | |
| 4.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 42,269,406,100.00 | | 42,269,406,100.00 | | 42,269,406,100.00 | | 42,269,406,100.00 | | 42,269,406,100.00 | | |
| Jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 42,269,406,100.00 | 12 | 42,269,406,100.00 | 12 | 42,269,406,100.00 | 12 | 42,269,406,100.00 | 12 | 42,269,406,100.00 | 41 | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 4 | | 41 | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| 4.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 8,010,000.00 | | 8,010,000.00 | | 8,010,000.00 | | 8,010,000.00 | | 8,010,000.00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 8,010,000.00 | 12 | 8,010,000.00 | 12 | 8,010,000.00 | 12 | 8,010,000.00 | 12 | 8,010,000.00 | 41 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 4.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 8,278,871,800.00 | | 8,278,871,800.00 | | 8,278,871,800.00 | | 8,278,871,800.00 | | 8,278,871,800.00 | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 8,278,871,800.00 | 12 | 8,278,871,800.00 | 12 | 8,278,871,800.00 | 12 | 8,278,871,800.00 | 12 | 8,278,871,800.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 15,682,624,980.00 | | 15,682,624,980.00 | | 15,682,624,980.00 | | 15,682,624,980.00 | | 15,682,624,980.00 | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 15,682,624,980.00 | 12 | 15,682,624,980.00 | 12 | 15,682,624,980.00 | 12 | 15,682,624,980.00 | 4 | 15,682,624,980.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 18,299,899,320.00 | | 18,299,899,320.00 | | 18,299,899,320.00 | | 18,299,899,320.00 | | 18,299,899,320.00 | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 18,299,899,320.00 | 12 | 18,299,899,320.00 | 12 | 18,299,899,320.00 | 12 | 18,299,899,320.00 | 12 | 18,299,899,320.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 24,428,036,094.00 | | 24,428,036,094.00 | | 24,428,036,094.00 | | 24,428,036,094.00 | | 24,428,036,094.00 | | |
| Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara | 1 | 1 | 50 | 24,428,036,094.00 | 40 | 24,428,036,094.00 | 40 | 24,428,036,094.00 | 40 | 24,428,036,094.00 | 40 | 24,428,036,094.00 | 171 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 0 | 6 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 111 | |
| | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 240 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 841 | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 2001 | |
| | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 100 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 107 | |
| | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 7 | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 3 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 14 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 3 | 2 | | 152 | | 152 | | 152 | | 152 | | 461 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung | 2 | 3 | 2 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 95 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | 1,520,426,400.00 | | 1,520,426,400.00 | | 1,520,426,400.00 | | 1,520,426,400.00 | | 1,520,426,400.00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 1 | 50 | 1,520,426,400.00 | 40 | 1,520,426,400.00 | 40 | 1,520,426,400.00 | 40 | 1,520,426,400.00 | 40 | 1,520,426,400.00 | 171 | |
| 4.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | 0 | 6 | 100,000,000.00 | 35 | 100,000,000.00 | 35 | 100,000,000.00 | 35 | 100,000,000.00 | 35 | 100,000,000.00 | 111 | |
| 4.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel | | | | | 750,100,000.00 | | 750,100,000.00 | | 750,100,000.00 | | 750,100,000.00 | | 750,100,000.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 240 | 750,100,000.00 | 200 | 750,100,000.00 | 200 | 750,100,000.00 | 200 | 750,100,000.00 | 200 | 750,100,000.00 | 841 | |
| 4.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 6,197,162,634.00 | | 6,197,162,634.00 | | 6,197,162,634.00 | | 6,197,162,634.00 | | 6,197,162,634.00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 500 | 6,197,162,634.00 | 500 | 6,197,162,634.00 | 500 | 6,197,162,634.00 | 500 | 6,197,162,634.00 | 500 | 6,197,162,634.00 | 20001 | |
| 4.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | 211,960,000.00 | | 211,960,000.00 | | 211,960,000.00 | | 211,960,000.00 | | 211,960,000.00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 100 | 211,960,000.00 | 2 | 211,960,000.00 | 2 | 211,960,000.00 | 2 | 211,960,000.00 | 2 | 211,960,000.00 | 107 | |
| 4.02.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | 150,740,900.00 | | 150,740,900.00 | | 150,740,900.00 | | 150,740,900.00 | | 150,740,900.00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 1 | 1 | 3 | 150,740,900.00 | 1 | 150,740,900.00 | 1 | 150,740,900.00 | 1 | 150,740,900.00 | 1 | 150,740,900.00 | 7 | |
| 4.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | 3,162,008,720.00 | | 3,162,008,720.00 | | 3,162,008,720.00 | | 3,162,008,720.00 | | 3,162,008,720.00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 3 | 2 | 3,162,008,720.00 | 3 | 3,162,008,720.00 | 3 | 3,162,008,720.00 | 3 | 3,162,008,720.00 | 3 | 3,162,008,720.00 | 14 | |
| 4.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 5,669,400,640.00 | | 5,669,400,640.00 | | 5,669,400,640.00 | | 5,669,400,640.00 | | 5,669,400,640.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 3 | 2 | 5,669,400,640.00 | 152 | 5,669,400,640.00 | 152 | 5,669,400,640.00 | 152 | 5,669,400,640.00 | 152 | 5,669,400,640.00 | 461 | |
| 4.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 6,666,236,800.00 | | 6,666,236,800.00 | | 6,666,236,800.00 | | 6,666,236,800.00 | | 6,666,236,800.00 | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 3 | 2 | 6,666,236,800.00 | 30 | 6,666,236,800.00 | 30 | 6,666,236,800.00 | 30 | 6,666,236,800.00 | 30 | 6,666,236,800.00 | 95 | |
| 4.02.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | | | 484,523,000.00 | | 484,523,000.00 | | 484,523,000.00 | | 484,523,000.00 | | 484,523,000.00 | | |
| Jumlah laporan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 484,523,000.00 | 12 | 484,523,000.00 | 12 | 484,523,000.00 | 12 | 484,523,000.00 | 12 | 484,523,000.00 | 41 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| 4.02.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan | | | | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 1,500,000.00 | 12 | 1,500,000.00 | 12 | 1,500,000.00 | 12 | 1,500,000.00 | 12 | 1,500,000.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | 458,018,000.00 | | 458,018,000.00 | | 458,018,000.00 | | 458,018,000.00 | | 458,018,000.00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 458,018,000.00 | 12 | 458,018,000.00 | 12 | 458,018,000.00 | 12 | 458,018,000.00 | 12 | 458,018,000.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | | 25,005,000.00 | | 25,005,000.00 | | 25,005,000.00 | | 25,005,000.00 | | 25,005,000.00 | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 25,005,000.00 | 12 | 25,005,000.00 | 12 | 25,005,000.00 | 12 | 25,005,000.00 | 12 | 25,005,000.00 | 41 | |
| 4.02.01.1.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | 159,293,561,700.00 | | 159,293,561,700.00 | | 159,293,561,700.00 | | 159,293,561,700.00 | | 159,293,561,700.00 | | |
| Indeks Kepuasan Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4 | 178,920,000.00 | 1 | 178,920,000.00 | 1 | 178,920,000.00 | 7 | 178,920,000.00 | 1 | 178,920,000.00 | 14 | |
| 4.02.01.1.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | 178,920,000.00 | | 178,920,000.00 | | 178,920,000.00 | | 178,920,000.00 | | 178,920,000.00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4 | 178,920,000.00 | 1 | 178,920,000.00 | 1 | 178,920,000.00 | 7 | 178,920,000.00 | 1 | 178,920,000.00 | 14 | |
| 4.02.01.1.16 - Layanan Administrasi DPRD | | | | | 21,680,150,828.00 | | 21,680,150,828.00 | | 21,680,150,828.00 | | 21,680,150,828.00 | | 21,680,150,828.00 | | |
| Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi | 1 | 1 | 4 | 21,680,150,828.00 | 1 | 21,680,150,828.00 | 1 | 21,680,150,828.00 | 1 | 21,680,150,828.00 | 1 | 21,680,150,828.00 | 8 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Keanggotaan DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan) | 9 | 9 | 4 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 40 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| 4.02.01.1.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 640.00 | 1 | 640.00 | 1 | 640.00 | 1 | 640.00 | 1 | 640.00 | 8 | |
| 4.02.01.1.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan) | 9 | 9 | 4 | 640.00 | 9 | 640.00 | 9 | 640.00 | 9 | 640.00 | 9 | 640.00 | 40 | |
| 4.02.01.1.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | 21,678,230,828.00 | | 21,678,230,828.00 | | 21,678,230,828.00 | | 21,678,230,828.00 | | 21,678,230,828.00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 | 1 | 4 | 21,678,230,828.00 | 12 | 21,678,230,828.00 | 12 | 21,678,230,828.00 | 12 | 21,678,230,828.00 | 12 | 21,678,230,828.00 | 41 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | DPRD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.1.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | | |
| Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4 | 640.00 | 1 | 640.00 | 1 | 640.00 | 1 | 640.00 | 1 | 640.00 | 8 | |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 271,140,625,991.00 | | 268,809,081,991.00 | | 277,022,833,991.00 | | 284,686,491,991.00 | | 328,966,572,991.00 | | |
| Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas fasilitasi fungsi pembentukan Perda DPRD | Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi fungsi pembentukan Perda DPRD (%) | 85,12 | 86 | 86,5 | 167,186,417,084.00 | 87 | 166,426,607,742.00 | 87,5 | 169,331,755,742.00 | 88 | 171,620,131,742.00 | 88,5 | 191,169,172,242.00 | 88 | |
| 4.02.02.1.01 - Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | | 44,910,502,000.00 | | 44,910,502,000.00 | | 44,910,502,000.00 | | 44,910,502,000.00 | | 44,910,502,000.00 | | |
| Jumlah Pembahasan Raperda yang dilaksanakan sesuai jadwal | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 44,910,502,000.00 | 1 | 44,910,502,000.00 | 1 | 44,910,502,000.00 | 1 | 44,910,502,000.00 | 1 | 44,910,502,000.00 | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 32 | |
| | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 11 | |
| | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang) | 0 | 1250 | 625 | | 750 | | 750 | | 750 | | 750 | | 4125 | |
| 4.02.02.1.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | 66,096,000.00 | | 66,096,000.00 | | 66,096,000.00 | | 66,096,000.00 | | 66,096,000.00 | | |
| Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 66,096,000.00 | 1 | 66,096,000.00 | 1 | 66,096,000.00 | 1 | 66,096,000.00 | 1 | 66,096,000.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.01.0002 - Pembahasan Rancangan Perda | | | | | 43,516,206,000.00 | | 43,516,206,000.00 | | 43,516,206,000.00 | | 43,516,206,000.00 | | 43,516,206,000.00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan | 1 | 1 | 4 | 43,516,206,000.00 | 9 | 43,516,206,000.00 | 9 | 43,516,206,000.00 | 9 | 43,516,206,000.00 | 9 | 43,516,206,000.00 | 32 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Rancangan Perda (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | |
| Terselenggarannya Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 81,200,000.00 | 4 | 81,200,000.00 | 4 | 81,200,000.00 | 4 | 81,200,000.00 | 4 | 81,200,000.00 | 17 | |
| 4.02.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | | | | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 500,000,000.00 | 2 | 500,000,000.00 | 2 | 500,000,000.00 | 2 | 500,000,000.00 | 2 | 500,000,000.00 | 11 | |
| 4.02.02.1.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | |
| Tersusunnya Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 81,200,000.00 | 1 | 81,200,000.00 | 1 | 81,200,000.00 | 1 | 81,200,000.00 | 1 | 81,200,000.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | | | | 665,800,000.00 | | 665,800,000.00 | | 665,800,000.00 | | 665,800,000.00 | | 665,800,000.00 | | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan | 0 | 1250 | 625 | 665,800,000.00 | 750 | 665,800,000.00 | 750 | 665,800,000.00 | 750 | 665,800,000.00 | 750 | 665,800,000.00 | 4125 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Pemerintah Daerah | Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 122,275,915,084.00 | | 121,516,105,742.00 | | 124,421,253,742.00 | | 126,709,629,742.00 | | 146,258,670,242.00 | | |
| Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 122,275,915,084.00 | 1 | 121,516,105,742.00 | 1 | 124,421,253,742.00 | 1 | 126,709,629,742.00 | 1 | 146,258,670,242.00 | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 32 | |
| | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 18 | 18 | 20 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 119 | |
| | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 45 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| 4.02.02.1.04.0001 - Orientasi DPRD | | | | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | 81,200,000.00 | | |
| Terselenggarannya Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 81,200,000.00 | 1 | 81,200,000.00 | 1 | 81,200,000.00 | 1 | 81,200,000.00 | 1 | 81,200,000.00 | 8 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.02.02.1.04.00 02 - Pendalaman Tugas DPRD | | | | | 3,789,790,000.00 | | 3,789,790,000.00 | | 3,789,790,000.00 | | 3,789,790,000.00 | | 3,789,790,000.00 | | |
| Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 3,789,790,000.00 | 9 | 3,789,790,000.00 | 9 | 3,789,790,000.00 | 9 | 3,789,790,000.00 | 9 | 3,789,790,000.00 | 32 | |
| 4.02.02.1.04.00 04 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | 1,719,550,000.00 | | 1,719,550,000.00 | | 1,719,550,000.00 | | 1,719,550,000.00 | | 1,719,550,000.00 | | |
| Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 18 | 18 | 20 | 1,719,550,000.00 | 27 | 1,719,550,000.00 | 27 | 1,719,550,000.00 | 27 | 1,719,550,000.00 | 27 | 1,719,550,000.00 | 119 | |
| 4.02.02.1.04.00 05 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | 864,000,000.00 | | 864,000,000.00 | | 864,000,000.00 | | 864,000,000.00 | | 864,000,000.00 | | |
| Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 9 | 9 | 9 | 864,000,000.00 | 9 | 864,000,000.00 | 9 | 864,000,000.00 | 9 | 864,000,000.00 | 9 | 864,000,000.00 | 45 | |
| 4.02.02.1.04.00 06 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | 59,202,997,224.00 | | 58,443,187,882.00 | | 61,348,335,882.00 | | 63,636,711,882.00 | | 83,185,752,382.00 | | |
| Terselenggarayа Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 59,202,997,224.00 | 12 | 58,443,187,882.00 | 12 | 61,348,335,882.00 | 12 | 63,636,711,882.00 | 12 | 83,185,752,382.00 | 41 | |
| 4.02.02.1.04.00 07 - Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | 59,200,000.00 | | 59,200,000.00 | | 59,200,000.00 | | 59,200,000.00 | | 59,200,000.00 | | |
| Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 59,200,000.00 | 1 | 59,200,000.00 | 1 | 59,200,000.00 | 1 | 59,200,000.00 | 1 | 59,200,000.00 | 5 | |
| 4.02.02.1.04.00 08 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | 56,559,177,860.00 | | 56,559,177,860.00 | | 56,559,177,860.00 | | 56,559,177,860.00 | | 56,559,177,860.00 | | |
| Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi | 1 | 1 | 4 | 56,559,177,860.00 | 12 | 56,559,177,860.00 | 12 | 56,559,177,860.00 | 12 | 56,559,177,860.00 | 12 | 56,559,177,860.00 | 41 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | DPRD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD | Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD (%) | 85,13 | 86 | 86,5 | 103,954,208,907.00 | 87 | 102,382,474,249.00 | 87,5 | 107,691,078,249.00 | 88 | 113,066,360,249.00 | 88,5 | 137,797,400,749.00 | 88 | |
| 4.02.02.1.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | 3,901,977,040.00 | | 3,901,977,040.00 | | 3,901,977,040.00 | | 3,901,977,040.00 | | 3,901,977,040.00 | | |
| Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran oleh DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 3,901,977,040.00 | 1 | 3,901,977,040.00 | 1 | 3,901,977,040.00 | 1 | 3,901,977,040.00 | 1 | 3,901,977,040.00 | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungja | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | waban APBD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.1.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | 199,535,000.00 | | 199,535,000.00 | | 199,535,000.00 | | 199,535,000.00 | | 199,535,000.00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 199,535,000.00 | 1 | 199,535,000.00 | 1 | 199,535,000.00 | 1 | 199,535,000.00 | 1 | 199,535,000.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | 170,003,120.00 | | 170,003,120.00 | | 170,003,120.00 | | 170,003,120.00 | | 170,003,120.00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 170,003,120.00 | 1 | 170,003,120.00 | 1 | 170,003,120.00 | 1 | 170,003,120.00 | 1 | 170,003,120.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.02.0003 - Pembahasan APBD | | | | | 2,520,675,000.00 | | 2,520,675,000.00 | | 2,520,675,000.00 | | 2,520,675,000.00 | | 2,520,675,000.00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 2,520,675,000.00 | 1 | 2,520,675,000.00 | 1 | 2,520,675,000.00 | 1 | 2,520,675,000.00 | 1 | 2,520,675,000.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.02.0004 - Pembahasan Perubahan APBD | | | | | 837,340,800.00 | | 837,340,800.00 | | 837,340,800.00 | | 837,340,800.00 | | 837,340,800.00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 837,340,800.00 | 1 | 837,340,800.00 | 1 | 837,340,800.00 | 1 | 837,340,800.00 | 1 | 837,340,800.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester | | | | | 67,088,120.00 | | 67,088,120.00 | | 67,088,120.00 | | 67,088,120.00 | | 67,088,120.00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan | 1 | 1 | 4 | 67,088,120.00 | 1 | 67,088,120.00 | 1 | 67,088,120.00 | 1 | 67,088,120.00 | 1 | 67,088,120.00 | 8 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Pelaksanaan APBD Per Semester | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02.1.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | 107,335,000.00 | | 107,335,000.00 | | 107,335,000.00 | | 107,335,000.00 | | 107,335,000.00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 107,335,000.00 | 1 | 107,335,000.00 | 1 | 107,335,000.00 | 1 | 107,335,000.00 | 1 | 107,335,000.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | 597,722,800.00 | | 597,722,800.00 | | 597,722,800.00 | | 597,722,800.00 | | 597,722,800.00 | | |
| Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 597,722,800.00 | 12 | 597,722,800.00 | 12 | 597,722,800.00 | 12 | 597,722,800.00 | 12 | 597,722,800.00 | 41 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 1 | 1 | 1 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 38 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 41 | |
| | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| 4.02.02.1.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | 66,375,000.00 | | 66,375,000.00 | | 66,375,000.00 | | 66,375,000.00 | | 66,375,000.00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 66,375,000.00 | 12 | 66,375,000.00 | 12 | 66,375,000.00 | 12 | 66,375,000.00 | 12 | 66,375,000.00 | 41 | |
| 4.02.02.1.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | 66,481,560.00 | | 66,481,560.00 | | 66,481,560.00 | | 66,481,560.00 | | 66,481,560.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 66,481,560.00 | 12 | 66,481,560.00 | 12 | 66,481,560.00 | 12 | 66,481,560.00 | 12 | 66,481,560.00 | 41 | |
| 4.02.02.1.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | 66,496,560.00 | | 66,496,560.00 | | 66,496,560.00 | | 66,496,560.00 | | 66,496,560.00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 66,496,560.00 | 12 | 66,496,560.00 | 12 | 66,496,560.00 | 12 | 66,496,560.00 | 12 | 66,496,560.00 | 41 | |
| 4.02.02.1.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | 66,603,120.00 | | 66,603,120.00 | | 66,603,120.00 | | 66,603,120.00 | | 66,603,120.00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 1 | 1 | 1 | 66,603,120.00 | 12 | 66,603,120.00 | 12 | 66,603,120.00 | 12 | 66,603,120.00 | 12 | 66,603,120.00 | 38 | |
| 4.02.02.1.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | 64,135,000.00 | | 64,135,000.00 | | 64,135,000.00 | | 64,135,000.00 | | 64,135,000.00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 64,135,000.00 | 1 | 64,135,000.00 | 1 | 64,135,000.00 | 1 | 64,135,000.00 | 1 | 64,135,000.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut | | | | | 66,816,560.00 | | 66,816,560.00 | | 66,816,560.00 | | 66,816,560.00 | | 66,816,560.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 66,816,560.00 | 1 | 66,816,560.00 | 1 | 66,816,560.00 | 1 | 66,816,560.00 | 1 | 66,816,560.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | 65,535,000.00 | | 65,535,000.00 | | 65,535,000.00 | | 65,535,000.00 | | 65,535,000.00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 65,535,000.00 | 12 | 65,535,000.00 | 12 | 65,535,000.00 | 12 | 65,535,000.00 | 12 | 65,535,000.00 | 41 | |
| 4.02.02.1.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | 135,280,000.00 | | 135,280,000.00 | | 135,280,000.00 | | 135,280,000.00 | | 135,280,000.00 | | |
| Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 135,280,000.00 | 1 | 135,280,000.00 | 1 | 135,280,000.00 | 1 | 135,280,000.00 | 1 | 135,280,000.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | 52,392,777,568.00 | | 52,392,777,568.00 | | 52,392,777,568.00 | | 52,392,777,568.00 | | 52,392,777,568.00 | | |
| Jumlah laporan Penyerapan dan | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan | 1 | 1 | 4 | 52,392,777,568.00 | 12 | 52,392,777,568.00 | 12 | 52,392,777,568.00 | 12 | 52,392,777,568.00 | 12 | 52,392,777,568.00 | 41 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Kerja DPRD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | |
| | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 2 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 15 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang) | 1.25 | 1250 | 1.25 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 4000 | |
| 4.02.02.1.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | 6,916,707,098.00 | | 6,916,707,098.00 | | 6,916,707,098.00 | | 20,916,707,098.00 | | 6,916,707,098.00 | | |
| Terselenggaraya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 6,916,707,098.00 | 12 | 6,916,707,098.00 | 12 | 6,916,707,098.00 | 12 | 20,916,707,098.00 | 12 | 6,916,707,098.00 | 41 | |
| 4.02.02.1.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | 495,849,250.00 | | 495,849,250.00 | | 495,849,250.00 | | 495,849,250.00 | | 495,849,250.00 | | |
| Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1 | 2 | 495,849,250.00 | 1 | 495,849,250.00 | 1 | 495,849,250.00 | 1 | 495,849,250.00 | 1 | 495,849,250.00 | 6 | |
| 4.02.02.1.05.0003 - Pelaksanaan Reses | | | | | 44,973,521,220.00 | | 44,973,521,220.00 | | 44,973,521,220.00 | | 30,973,521,220.00 | | 44,973,521,220.00 | | |
| Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 2 | 3 | 3 | 44,973,521,220.00 | 3 | 44,973,521,220.00 | 3 | 44,973,521,220.00 | 3 | 30,973,521,220.00 | 3 | 44,973,521,220.00 | 15 | |
| 4.02.02.1.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | | | | | 6,700,000.00 | | 6,700,000.00 | | 6,700,000.00 | | 6,700,000.00 | | 6,700,000.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang) | 1.25 | 1250 | 1.25 | 6,700,000.00 | 500 | 6,700,000.00 | 500 | 6,700,000.00 | 500 | 6,700,000.00 | 500 | 6,700,000.00 | 4000 | |
| 4.02.02.1.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | 424,500,000.00 | | 424,500,000.00 | | 424,500,000.00 | | 424,500,000.00 | | 424,500,000.00 | | |
| Jumlah Laporan fasilitasi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 1 | | 1 | 424,500,000.00 | 1 | 424,500,000.00 | 1 | 424,500,000.00 | 1 | 424,500,000.00 | 1 | 424,500,000.00 | 5 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | |
| 4.02.02.1.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | 60,880,000.00 | | 60,880,000.00 | | 60,880,000.00 | | 60,880,000.00 | | 60,880,000.00 | | |
| Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 60,880,000.00 | 1 | 60,880,000.00 | 1 | 60,880,000.00 | 1 | 60,880,000.00 | 1 | 60,880,000.00 | 5 | |
| 4.02.02.1.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | 363,620,000.00 | | 363,620,000.00 | | 363,620,000.00 | | 363,620,000.00 | | 363,620,000.00 | | |
| Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 1 | 1 | 1 | 363,620,000.00 | 1 | 363,620,000.00 | 1 | 363,620,000.00 | 1 | 363,620,000.00 | 1 | 363,620,000.00 | 5 | |
| 4.02.02.1.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | 114,613,120.00 | | 114,613,120.00 | | 114,613,120.00 | | 114,613,120.00 | | 114,613,120.00 | | |
| Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan kerjasama | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan | 1 | 1 | 1 | 114,613,120.00 | 4 | 114,613,120.00 | 4 | 114,613,120.00 | 4 | 114,613,120.00 | 4 | 114,613,120.00 | 14 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| daerah oleh DPRD | Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 14 | |
| 4.02.02.1.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | | 57,306,560.00 | | 57,306,560.00 | | 57,306,560.00 | | 57,306,560.00 | | 57,306,560.00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | 57,306,560.00 | 4 | 57,306,560.00 | 4 | 57,306,560.00 | 4 | 57,306,560.00 | 4 | 57,306,560.00 | 14 | |
| 4.02.02.1.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | | 57,306,560.00 | | 57,306,560.00 | | 57,306,560.00 | | 57,306,560.00 | | 57,306,560.00 | | |
| Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 1 | 57,306,560.00 | 4 | 57,306,560.00 | 4 | 57,306,560.00 | 4 | 57,306,560.00 | 4 | 57,306,560.00 | 14 | |
| 4.02.02.1.08 - Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | 46,522,618,379.00 | | 44,950,883,721.00 | | 50,259,487,721.00 | | 55,634,769,721.00 | | 80,365,810,221.00 | | |
| Jumlah laporan fasilitasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 46,522,618,379.00 | 12 | 44,950,883,721.00 | 12 | 50,259,487,721.00 | 12 | 55,634,769,721.00 | 12 | 80,365,810,221.00 | 41 | |
| | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | DPRD yang Disusun (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | |
| 4.02.02.1.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | 41,343,695,539.00 | | 39,771,960,881.00 | | 45,080,564,881.00 | | 50,455,846,881.00 | | 75,186,887,381.00 | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 41,343,695,539.00 | 12 | 39,771,960,881.00 | 12 | 45,080,564,881.00 | 12 | 50,455,846,881.00 | 12 | 75,186,887,381.00 | 41 | |
| 4.02.02.1.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | 49,400,000.00 | | 49,400,000.00 | | 49,400,000.00 | | 49,400,000.00 | | 49,400,000.00 | | |
| Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 1 | 1 | 4 | 49,400,000.00 | 1 | 49,400,000.00 | 1 | 49,400,000.00 | 1 | 49,400,000.00 | 1 | 49,400,000.00 | 8 | |
| 4.02.02.1.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | 688,600,000.00 | | 688,600,000.00 | | 688,600,000.00 | | 688,600,000.00 | | 688,600,000.00 | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASE LINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA PD 2025-2029 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 688,600,000.00 | 4 | 688,600,000.00 | 4 | 688,600,000.00 | 4 | 688,600,000.00 | 4 | 688,600,000.00 | 17 | |
| 4.02.02.1.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | 4,163,047,840.00 | | 4,163,047,840.00 | | 4,163,047,840.00 | | 4,163,047,840.00 | | 4,163,047,840.00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 4,163,047,840.00 | 4 | 4,163,047,840.00 | 4 | 4,163,047,840.00 | 4 | 4,163,047,840.00 | 4 | 4,163,047,840.00 | 17 | |
| 4.02.02.1.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | | | 277,875,000.00 | | 277,875,000.00 | | 277,875,000.00 | | 277,875,000.00 | | 277,875,000.00 | | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen) | 1 | 1 | 4 | 277,875,000.00 | 1 | 277,875,000.00 | 1 | 277,875,000.00 | 1 | 277,875,000.00 | 1 | 277,875,000.00 | 8 | |

## 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan selama periode perencanaan 2025–2029. Sasaran strategis yang telah ditetapkan akan diterjemahkan dalam bentuk capaian yang dapat diukur melalui indikator kinerja utama yang relevan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk lima tahun ke depan. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

| No | Indikator | Satuan | Target Awal Tahun 2025 | Target Tahun | | | | | | Kondisi akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Indeks | 86 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 88 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Target pencapaiannya ditetapkan secara bertahap dengan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 target IKM ditetapkan sebesar 86,0, kemudian naik secara bertahap hingga mencapai 88,0 pada tahun 2029. Peningkatan target tersebut mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD untuk terus meningkatkan kualitas layanan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

## 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang menjadi penjabaran lebih operasional dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, IKK yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 juga tercantum sebagai bagian dari IKK dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, sehingga pencapaiannya tidak hanya berdampak pada kinerja internal Sekretariat DPRD, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap capaian pembangunan daerah. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

| No | Indikator | Satuan | Target Awal Tahun 2025 | Target Tahun | | | | | | Kondisi akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Indeks | 86 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 88 |

Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Target IKM ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029 dengan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar 86,0 dan meningkat setiap tahun hingga mencapai 88,0 pada tahun 2029.

Pencapaian target IKK ini menjadi tolok ukur keberhasilan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan prima, akuntabel, dan profesional kepada DPRD. Semakin tinggi nilai IKM yang dicapai, semakin menunjukkan bahwa dukungan kesekretariatan yang diberikan efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan DPRD, sekaligus menjadi bentuk kontribusi nyata Sekretariat DPRD dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Timur.

# BAB V
## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah selama lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga setiap sasaran dan indikator yang ditetapkan dapat dipantau serta dievaluasi secara terukur.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Timur.

DPRD